



TAHUN
2024

LAPORAN KINERJA (LKJIP)

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**N
KORUPSI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Parangin, Januari 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran meningkatnya realisasi Investasi Daerah dengan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024 sebesar 719,226 Milyar atau capaian kinerja sebesar 117,91%.
- b. Sasaran meningkatnya kemudahan berusaha dengan Indeks Kemudahan Berinvestasi tahun 2024 sebesar 93,969 dengan capaian kinerja 106,18%.
- c. Sasaran pelayanan perizinan dan non perizinan dengan Nilai survey kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar 94,05 dengan capaian kinerja 102,33%.

Realisasi anggaran belanja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. **10,974,200,991,-** atau **89,80%** dari pagu sebesar Rp. **12,221,096,362,-** sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan telah melakukan **efisiensi** anggaran sebesar **1,246,895,371,-**.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan ke depan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM	2
1. Struktur Organisasi.....	2
2. Tugas dan Fungsi.....	4
3. Isu-isu Strategis	5
4. Keadaan Pegawai	5
5. Keadaan Sarana dan Prasana	6
D. LANDASAN HUKUM	6
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN	7
BAB 2 PERENCANAAN	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	10
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	14
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA DPMPSTP TAHUN 2024	19
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
1. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi.....	20
2. Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	35
3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	42
C. REALISASI ANGGARAN.....	48
D. KINERJA LAINNYA	54
1. Penghargaan	54
2. Inovasi.....	59
E. RENCANA AKSI ATAS LHE SAKIP INSPEKTORAT	63
BAB 4 PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. RENCANA TINDAK LANJUT	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pegawai	5
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026	10
Tabel 2.2 Rencana Strategis DPMPTSPPTK 2021-2026	12
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 2.5 Target Belanja Tahun 2024	16
Tabel 2.6 Target Belanja Program.....	17
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	18
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel 3.2 Capaian Kinerja	20
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi.....	20
Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi investasi	21
Tabel 3.5 Sebaran Investasi berdasarkan sektor	22
Tabel 3.6 Capaian s.d 2024 terhadap target akhir Renstra.....	23
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Investasi dengan Provinsi dan Nasional.....	23
Tabel 3.8 Realisasi kinerja dan anggaran berdasarkan sasaran	33
Tabel 3.9 Program/kegiatan penunjang keberhasilan	33
Tabel 3.10 Perbandingan antara target dan realisasi kemudahan berusaha.....	35
Tabel 3.11 Capaian indikator kemudahan berusaha	36
Tabel 3.12 Perbandingan dengan Kabupaten Skala Nasional	36
Tabel 3.13 Perbandingan dengan Kabupaten se Kalimantan Selatan.....	37
Tabel 3.14 Realisasi kinerja dan anggaran berdasarkan sasaran	40
Tabel 3.15 Program/kegiatan penunjang keberhasilan	41
Tabel 3.16 Capaian indikator nilai survey kepuasan masyarakat.....	42
Tabel 3.17 Refokusing Anggaran	47
Tabel 3.18 Rrealisasi pendapatan Tahun 2024	48
Tabel 3.19 Rrealisasi belanja Tahun 2024.....	49
Tabel 3.20 Analisa sub kegiatan dengan realisasi rendah.....	52
Tabel 3.21 Tindak lanjut atas LHE	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 IPRO Komoditas Beras Kemasan	24
Gambar 3.2 IPRO Pembangunan Hotel.....	24
Gambar 3.3 Kalsel EXPO	25
Gambar 3.4 Jateng Fair.....	26
Gambar 3.5 Bimtek LKPM.....	26
Gambar 3.6 Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha	27
Gambar 3.7 Inspeksi/Pengawasan di Balangan Coal	28
Gambar 3.8 Pengawasan di PT Adaro Indonesia	28
Gambar 3.9 Pengawasan Perizinan UMK	28
Gambar 3.10 Forum Investasi Kalimantan Selatan	29
Gambar 3.11 Dedicated Team Meeting BI RIRU Intan Kalsel.....	29
Gambar 3.12 FGD Potensi Investasi Kabupaten Balangan	29
Gambar 3.13 Screenshot Inovasi.....	30
Gambar 3.14 Profil Resiko	30
Gambar 3.15 Penyusunan Pedoman Teknis Pemberian Insentif Kemudahan Berusaha .	37
Gambar 3.16 Rapat Tim Koordinasi Teknis Perizinan	38
Gambar 3.17 Kegiatan Pelatihan Excellent Service.....	43
Gambar 3.18 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Online.....	44
Gambar 3.19 Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik.....	45
Gambar 3.20 Aplikasi SIMBG	45
Gambar 3.21 Aplikasi MPP Digital	46
Gambar 3.22 Penerimaan Penghargaan WBK	53
Gambar 3.23 Piagam Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	53
Gambar 3.24 Piagam Penilaian Kinerja.....	54
Gambar 3.25 Piagam Penghargaan Inovasi	54
Gambar 3.26 Piagam IPRO.....	55
Gambar 3.27 Piagam Penerapan Budaya Kerja dan Penerapan Core Values	55
Gambar 3.28 Agen Perubahan	56
Gambar 3.29 Piagam Agen Perubahan	56
Gambar 3.30 ASN Berprestasi	57
Gambar 3.31 Piagam Indeks Profesionalisma ASN Lingkup SKPD.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Realisasi Investasi Triwulanan Berdasarkan PMDN dan PMA Tahun 2024	21
Grafik 3.2 Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2024	22
Grafik 3.3 Peningkatan Nilai	35
Grafik 3.4 Nilai SKM	42

Bab 1 Berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika LKjIP

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

B. TUJUAN

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. GAMBARAN UMUM

1. Struktur Organisasi

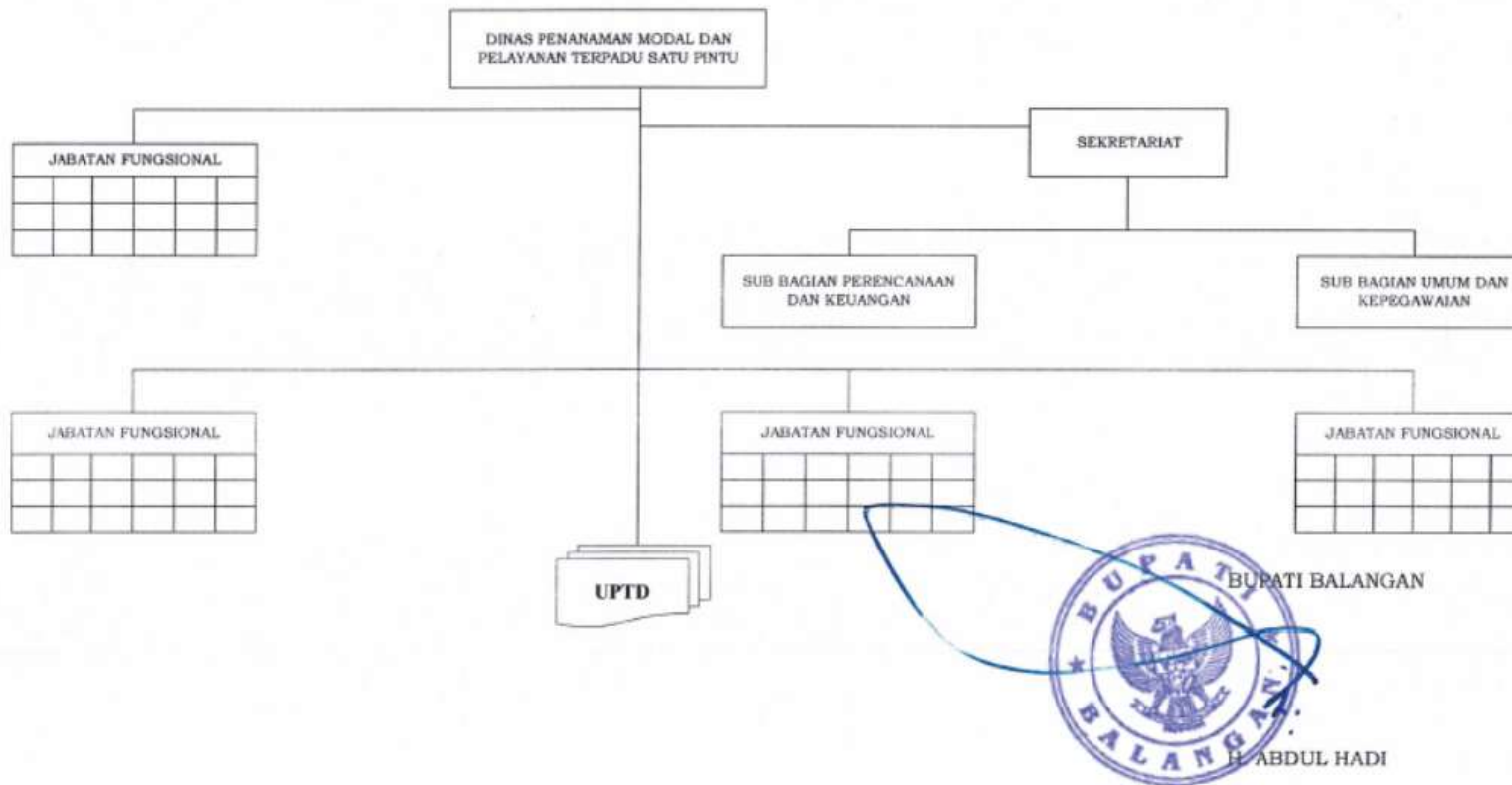
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk menunjang urusan pemerintah di Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 pasal 17, Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat** terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan**
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
- b. Melaksanakan Koordinasi secara berkelanjutan dengan SKPD terkait
- c. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Daerah.
- d. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang berkualitas.

4. Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan saat ini kebutuhan SDM baru terpenuhi sejumlah 42 orang ASN dengan rincian sebagai mana pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pegawai

No.	Uraian	Jumlah	S.3	S.2	S.1	SMA
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-
3	Kepala Sub Bagian	2	-	1	1	-
4	JF Penyetaraan	9	-	8	1	-
5	Pelaksana	2	-	-	2	-
6	Fungsional PPPK	1	-	-	1	-
7	Tenaga Kontrak	44	-	1	25	18
	JUMLAH	42	1	11	30	18

**data per 31 Desember 2024*

5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti: perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarpras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

- Gerai Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Ruang Tunggu Pelayanan
- Loker Konsultasi
- Ruang Arsip
- Ruang Bermain Anak
- Parkir
- Kendaraan Operasional Perizinan

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
7. Peraturaan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Urusan Penanaman Modal
8. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Permen BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah

10. Permen BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan.
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahunmendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran

utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapaisasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Bab 2 Berisi :

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Rencana Anggaran Tahun 2024

PERENCANAAN

A. RENCANA STRATEGIS

Memasuki Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menyusun Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Penyesuaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan merupakan manifestasi komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah **‘Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera’** dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Indeks Infrastruktur Publik
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan
2	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BALANGAN BERBASIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
				Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
		Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah) Angka Pengangguran Terbuka
3	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BALANGAN	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya Indeks Kesehatan	Meningkatnya Indeks Kesehatan	Usia Harapan Hidup
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)
				Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran)
				Prevalensi Stunting
Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR)				
4	MENINGKATKAN KUALITAS DAN LAYANAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI ABDI MASYARAKAT DAN ABDI NEGARA	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	NILAI SAKIP
				Opini BPK
				Nilai EKPPD
				Indeks Pelayanan Publik
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan
			Bertahannya Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	Angka PPKS yang tertangani
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
			Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	Indeks Resiko Bencana
			Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya
				Indeks Desa Membangun

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi** dengan indikator capaian sasaran **Pertumbuhan Nilai Investasi** .

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan visi **“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”** dan misi ke 2 **“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif”**, maka tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selama 5 tahun anggaran adalah Tujuan SKPD hasil penyesuaian Renstra Tahun 2021 s.d 2026 adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan dengan Indikator Persentase peningkatan Nilai Realisasi Investasi.

Untuk mewujudkan tujuan SKPD diatas disusun Sasaran Strategis SKPD beserta Indikator kinerja utama sesuai hasil rewiu Penyesuaian Renstra 2021 s.d 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Hasil Reviu Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rp	216,47 M	400M	600 M	610 M	615 M	620 M	1.100 M
		Meningkatnya kemudahan berusaha/berinvestasi	Indeks kemudahan berusaha/berinvestasi (EoDB)	Skor	-	-	69,6	70,5	71	71,5	72

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama disusun dengan tujuan untuk endapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan serta endapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik. Berikut tabel IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBERDATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) /Kementerian Investasi/BKPM
2	Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda oleh Kementerian Investasi/BKPM

Setelah sararan strategis beserta indicator ditetapkan, kemudian disusunnya makna dan formulasi perhitungan atas indicator yang telah ditetapkan beserta sumber perolehan Data hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai realisasi investasi adalah angka yang diperoleh berdasarkan press release dari Kementerian Investasi/BKPM yang diterbitkan per Triwulan. Angka realisasi investasi PMDN dan PMA setiap triwulan dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Indeks Kemudahan Berusaha/Berinvestasi untuk mengetahui sejauh mana kemudahan perizinan yang diberikan dalam pelaksanaan berusaha di Kabupaten Balangan dan nilai diperoleh dari hasil penilaian kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh Kementerian Investasi/BKPM RI.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD dan Penyesuaian Renstra SKPD Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	610 M
2	Meningkatkan Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berusaha/ Berinvestasi (EoDB)	88,50
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	92,75 (A)

Pada tabel 2.4 merupakan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan SKPD (Terwujudnya Investasi yang berkelanjutan) dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya realisasi Investasi daerah dengan indicator realisasi Investasi sebesar **610 M** pada tahun 2024.
2. Sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi mengindikasikan bahwa salah satu factor yang dapat meningkatkan realisasi investasi di Daerah adalah salah satunya melalui kemudahan berinvestasi bagi para calon investor, target indeks kemudahan berinvestasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024 adalah 70,5 yang mengambil data dari matrix penyesuaian renstra, tetapi dengan pertimbangan realisasi tahun sebelumnya sudah mencapai Nilai 88,475 maka target diubah pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 menjadi **88,500**.
3. Sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan sebenarnya adalah pada level kinerja taktikal intermediate yang secara leveling dibebankan pada Pejabat Eselon III, tetapi karena perubahan numenkelatur SKPD yang baru tidak ada lagi jabatan struktural Kabid pada Teknis sehingga setelah meminta arahan dan masukan dari beberapa pihak terkait termasuk Bagian Organisasi, sasaran ini dibebankan pada Kinerja Eselon II.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis diatas telah disusun beberapa strategi yang akan dilakukan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya realisasi investasi daerah beberapa strategi kebijakan direncanakan seperti
 - Meningkatkan iklim investasi di Daerah dengan target 2 sektor potensi investasi baru.
 - Meningkatkan rencana/ minat investasi dengan target rencana investasi/Nilai persetujuan investasi sebesar 400 M.
 - Meningkatkan kepatuhan penyampaian LKPM dengan target 90% Pelaku Usaha terdaftar yang menyampaikan LKPM.
2. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi ditindaklanjuti dengan:
 - Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dengan target Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,75 (A) atau Sangat Memuaskan.
 - Meningkatnya Pengelolaan data dan informasi penanaman modal dengan target 100%.

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran bersumber dari APBD dan APBN (DAK) dengan total anggaran sebesar Rp **12.221.096.362,-** dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.11.027.583.462 , - dan belanja modal sebesar Rp.1.193.512.900 sebagaimana tabel:

Tabel 2.5 Target Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	BELANJA OPERASI	Rp.11.027.583.462	90,23%
1.a	Belanja Pegawai	Rp. 4.861.167.082	
1.b	Belanja Barang dan Jasa	Rp.6.166.416.380	
2	BELANJA MODAL	Rp.1.193.512.900	9,77%
	Jumlah	Rp. 12.221.096.362	100%

Dari tabel target belanja tahun 2024 tergambar bahwa anggaran untuk membiayai belanja operasi sebesar 90,23% dari total anggaran dimana dari total anggaran belanja operasi tersebut sebesar Rp. **4.861.167.082** atau 44,08% adalah belanja tidak langsung/ belanja pegawai dan sebesar Rp.6.166.416.380 atau 55,92% dari total belanja operasi adalah belanja barang dan jasa sedangkan untuk belanja modal sebesar 9,23% dari total pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024. Sedangkan untuk rincian anggaran berdasarkan Program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Target Belanja Program

No	Program	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
			Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72 (BB)	9.747.275.042	72 (BB)	9.747.275.042
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1	237.322.000	2	320.622.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	220 M	492.902.900	400 M	521.783.700
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey IKM Terhadap Pelayanan	90.00 (A)	413.362.000	92.75 (A)	822.511.620
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	90%	570.409.000	90%	661.209.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	212.895.000	100%	147.695.000
TOTAL				11.639.676.442		12.221.096.362

Dari tabel diatas dapat dilihat ada 6 Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 serta alokasi anggaran per Program dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis SKPD yang terdiri dari 5 (lima) Program Urusan Penanaman Modal dan 1 (Satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Selain menggunakan APBD ada 1 Program yang juga ditunjang dengan penganggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Urusan Penanaman Modal.

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis.

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM YANG Mendukung	ANGGARAN	TOTAL	%
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.320.622.000	Rp 1.503.614.700	11, 47%
		Program Promosi Penanaman Modal	Rp.521.783.700		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.661.209.000		
2	Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.822.511.620	Rp 970.206.620	2,6 9%
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.147.695.000		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		Rp. 9.747.275.042		

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran meningkatnya investasi daerah anggaran yang dialokasikan adalah sebesar 1.503.614.700 untuk membiayai 3 Program Prioritas dan untuk sasaran meningkatnya kemudahan berusaha/berinvestasi sebesar Rp.970.206.620. Sementara Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah lebih besar yaitu Rp. 9.747.275.042, walaupun secara tidak langsung tetapi alokasi belanja pada program penunjang sangat vital dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan pelayanan publik di Bidang Penanaman Modal, karena dana yang dialokasikan untuk pemenuhan sarana penunjang kinerja dan operasional Sumber Daya yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

BAB 3

Bab 3 Berisi :

- A. *Capaian Kinerja*
- B. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
- C. *Realisasi Anggaran*
- D. *Kinerja Lainnya*
- E. *Inovasi*
- F. *Rencana Aksi*

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Dalam pemaknaan dari capaian nilai kinerja, Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja untuk Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk semua SKPD di Kabupaten Balangan, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja Kabupaten Balangan Tahun 2024

No	Kategori Capaian	Angka Interpretasi
1	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 - 90	Memuaskan
3	> 70 - 80	Sangat Memuaskan
4	> 60 - 70	Baik
5	> 50 - 60	Cukup Baik
6	> 30 - 50	Kurang
7	0 - 30	Sangat Kurang

A. CAPAIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2024

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel sasaran strategis berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	610 M	719,226 M	117,91%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	88.50	93.969	106,18%	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,75	94,05	102.33%	Sangat Memuaskan

Dari tabel sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan semua indikator yang telah memenuhi target dengan capaian melebihi 100% dan kategori capaian “**Sangat Memuaskan**”.

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

Indikator	2023	2024		Capaian s.d 2024 terhadap 2026	
	Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
Nilai Realisasi Investasi	471,226 M	610 M	719,226 M	117,91%	155,38%
Rata-rata Capaian				117,91%	155,38%

Realisasi Investasi Tahun 2024 adalah 719,226 dengan capaian kinerja 117,91% dengan Kategori capaian Sangat Memuaskan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 78,53% dari target yang telah ditetapkan. Sementara capaian sampai dengan 2024 terhadap target RPJMD 2026 sudah tercapai bahkan melebihi angka 100%.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

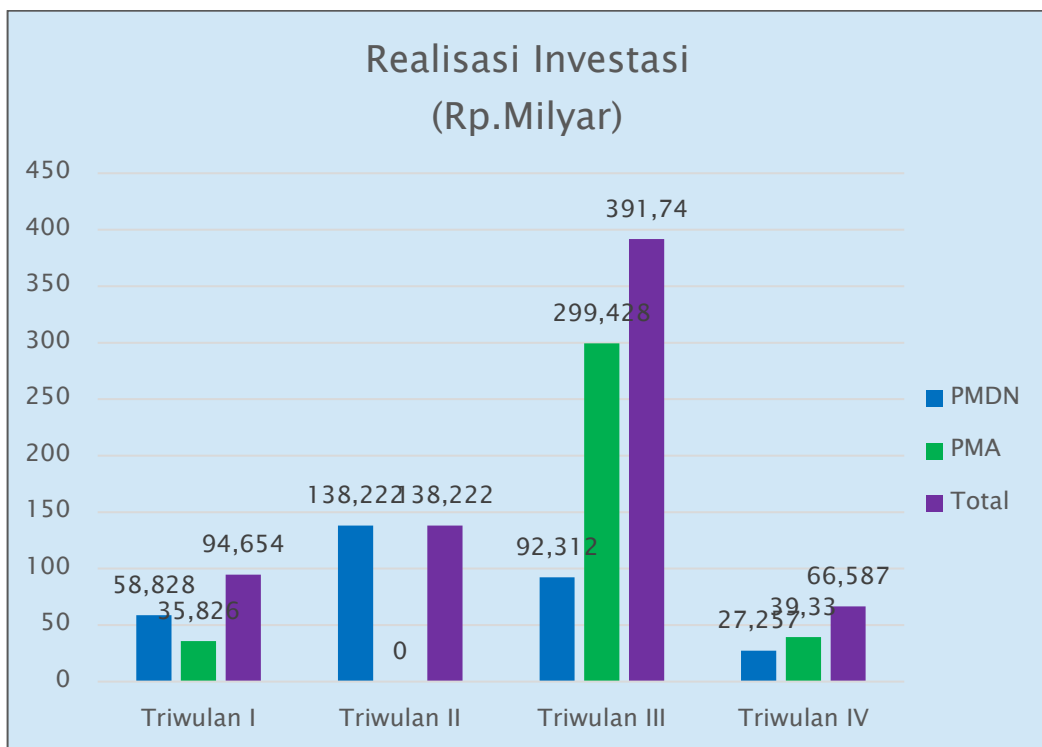
Tabel 3.4 Perbandingan antara Target dan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
Nilai Realisasi Investasi	610 M	719,226 M	117,91%	Sangat Memuaskan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024 adalah 719,226 Millyar jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2024 yaitu sebesar 610 Milyar maka capaian kinerja sebesar 117,91% dengan Kategori capaian Sangat Memuaskan.

Realisasi investasi PMDN sebesar Rp.323.400.890.388,- dari 606 proyek selama 2024 dan PMA sebesar Rp. 395.825.317.039,- dari total 13 proyek PMA selama tahun 2024. Tingginya nilai realisasi investasi dapat mengindikasikan bahwa iklim investasi di suatu daerah semakin kondusif bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya. Nilai realisasi investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3. 1 Realisasi Investasi Triwulanan Berdasarkan PMDN dan PMA Tahun 2024



Realisasi Investasi dihasilkan dari LKPM secara periodic baik PMDN dan PMA. Tren realisasi investasi dari Triwulan 1 sampai dengan 3 meningkat dan terjadi penurunan pada Triwulan ke 4, hal ini berbeda dengan tren Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang mana realisasi pada Triwulan 4 pada Tahun tersebut meningkat dari 3 triwulan sebelumnya. Penurunan realisasi pada Triwulan 4 Tahun 2024 ini disebabkan nilai realisasi yang dilaporkan oleh Perusahaan (PMA) potensi penyumbang Nilai yang tinggi gagal Aprove oleh BKPM.

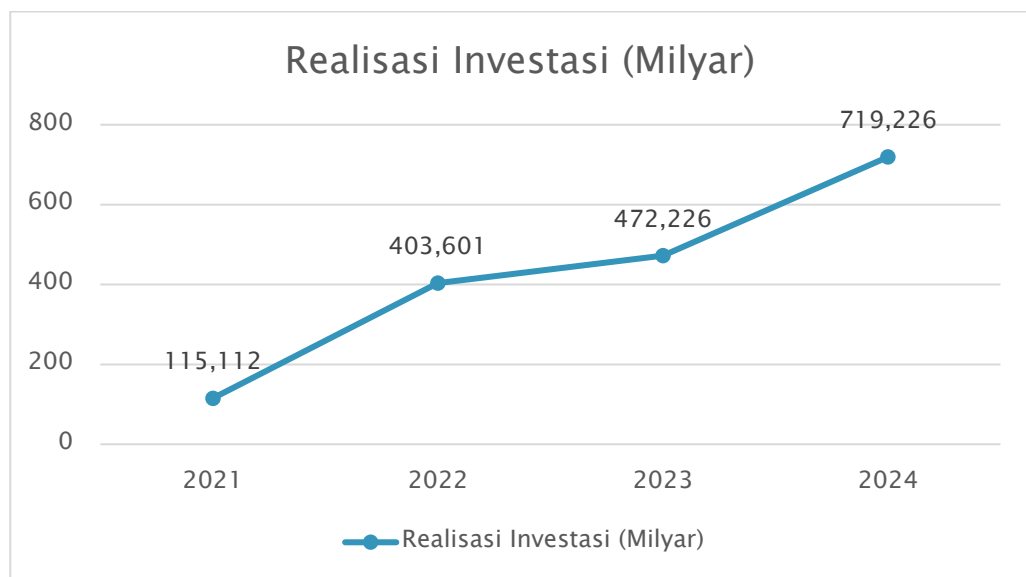
Tabel 3.5 Sebaran Investasi berdasarkan Sektor

Sektor	Rupiah
Konstruksi	180.106.712
Perdagangan dan Reparasi	814.794.544
Jasa Lainnya	19.700.684.250
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	40.146.758.860
Pertambangan	664.268.343.970

Seperti tahun sebelumnya Investasi di Kabupaten Balangan masih dominan pada sector Pertambangan yang menyumbang sebesar 664,268 Milyar atau lebih dari 91% diikuti sector perumahan ,Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar 5,6%. Sementara sector yang potensi menyerap Tenaga Kerja yaitu Pertanian masih belum ada investasi yang masuk.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan Tahun sebelumnya

Grafik 3.2 Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2024



Tren realisasi investasi selama 4 (empat) tahun terakhir selalu meningkat. Pencapaian kinerja tahun 2024 didapat berdasarkan data yang didapat dari rilis LKPM oleh Kementerian Investasi/BKPM RI sampai dengan triwulan 4 Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.719.226.207.427,-** (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2023 realisasi investasinya sebesar **Rp.471.226.861.079** (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Pulu Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Nilai realisasi investasi mengalami **peningkatan** sebesar **Rp. 247.999.346.348** atau **53,67%** dari capaian tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.6 Capaian s.d 2024 terhadap target Akhir Renstra Tahun 2026

Tahun	Realisasi Pertahun (Milyar Rupiah)	Akumulasi (Milyar Rupiah)	Target Akhir Renstra (Milyar Rupiah)	Capaian
2021	115,112	115,112	1.100	10,46%
2022	403,601	518,713		47,16%
2023	471,226	989,939		89,99%
2024	719,226	1709,165		155,38%

Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Investasi sampai dengan tahun 2024 yang mencapai 1.714,049 Milyar/ 1,7 Triliyun terhadap target capaian akhir Renstra tahun 2026 yang sebesar 1.100 Milyar/1,1 Trilyun maka capaian sudah diangka 155,38% dan sudah melebihi target akhir Renstra.

d. Perbandingan realisasi dengan Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja antara Kabupaten Balangan, Provnsi dan Nasional pada Tahun 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan realisasi Investasi dengan realisasi Provinsi dan Nasional

Perbandingan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Persentase Peningkatan
Nasional	1.418,9 T	1.714,2 T	20,81 %
Provinsi	19.762,24 M	24.850,7 M	25,72%
Balangan	471,226 M	719,226 M	53,67%

Pada tabel dapat kita lihat besarnya capaian realisasi investasi Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp 24.850,7 M. Pada besarnya capaian realisasi tersebut Kabupaten Balangan mengambil bagian sebesar **Rp.724.110.688.336** atau sebesar **2,38%** dari capaian realisasi Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan capaian realisasi investasi nasional mampu mencapai **Rp 1.714,2 T** dimana Kabupaten Balangan mengambil bagian sebesar **Rp.724.110.688.336** dari capaian tersebut atau sebesar **0,04%** dari capaian realisasi Nasional. Sedangkan perbandingan peningkatan investasi dari tahun sebelumnya untuk peningkatkan investasi Provinsi adalah sebanyak 25,72% dan nasional sebanyak 20,81%, sementara untuk kabupaten Balangan mengalami peningkatan signifikan yaitu sebanyak 53,67%.

e. Analisis/Faktor Pendorong dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2024

1. Pengembangan iklim penanaman modal dengan hasil 2 sektor potensi investasi baru yaitu sector perhotelan dan kemasan beras/jagung yang dituangkan dalam kajian /dokumen IPRO.

Gambar 3.1 IPRO Komoditas Beras Kemasan

The infographic promotes 'SIAM MADU' rice as a packaged agricultural commodity. It highlights a production capacity of 30 tons per month and a 10-year project history. The contact information for DPMPTSP in Balangan is provided as 0821-6720-2076. A prominent blue banner at the bottom reads 'PELUANG POTENSI INVESTASI'.

Gambar 3.2 IPRO Pembangunan Hotel

This infographic details an investment project for hotel construction. It features a background map, a market structure table, and a financing structure map. The investment value is listed as Rp 04 Miliar. The table below summarizes the market structure data:

Indikator	Nilai
Luas Lahan	100 Ha
Luas Bangunan	1000 m²
Luas Lahan	100 Ha
Luas Bangunan	1000 m²

2. Promosi penanaman modal yang menghasilkan Nilai persetujuan investasi/ rencana investasi bagi PMDN sebesar 18 T berdasarkan penerbitan NIB Tahun 2024.

Gambar 3.3 Kalsel Expo



Gambar 3.4 Jateng Fair



3. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal yang menghasilkan peningkatan kepatuhan para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM pada Tahun 2024 ada sebanyak 265 kegiatan usaha terlaporkan.

Gambar 3.5 Bimtek LKPM



4. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal kepada 232 pelaku usaha/UMKM di Kecamatan sekaligus fasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berujung pada persetujuan /rencana penanaman modal.

Gambar 3.6 Bimtek implementasi Perizinan Berusaha



5. Pengawasan Penanaman Modal secara jempot bola kepada 42 Pelaku Usaha oleh Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Balangan.

Gambar 3.7 Inspeksi/Pengawasan di Balangan Coal



Gambar 3.8 Pengawasan di PT Adaro Indonesia



Gambar 3.9 Pengawasan Perizinan UMK



6. Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, one on one meeting

Gambar 3.10 Forum Investasi Kalimantan Selatan



Gambar 3.11 Dedicated Team meeting BI RIRU Intan Kalsel



Gambar 3.12 FGD Potensi Investasi Kabupaten Balangan



- Keberhasilan pembinaan, pemantauan dan pengendalian yang dilaksanakan aparaturnya DPMPTSP serta peran pemerintah daerah melalui berbagai Inovasi seperti Inovasi Ladang Porang dan Lantunan Sabawa

Gambar 3.13 Screenshot Inovasi



- Tersedia dokumen pemetaan profil resiko strategis dan resiko operasional SKPD melalui penyusunan **rencana tindak pengendalian** yang melibatkan seluruh pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan seluruh unsur organisasi untuk memitigasi resiko secara periodik.

Gambar 3.14 Profil Resiko



f. Analisis Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Tim Pengawasan Penanaman Modal belum optimal.
2. Belum optimalnya potensi investasi di setiap sector yang menyebabkan Investasi masih didominasi sector pertambangan dan penggalian.
3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) belum dijadikan pegangan dalam pengembangan ekonomi daerah.
4. Belum lengkapnya informasi pada peta potensi tentang sector usaha prioritas Daerah yang siap ditawarkan kepada Investor (IPRO).
5. Belum adanya penanaman modal besar yang bermitra dengan UMKM.
6. Belum adanya keselarasan antara tata ruang dengan kebutuhan investasi.
7. Belum terjadinya sinergitas antar SKPD terkait event/ kegiatan promosi potensi daerah.
8. Belum selesainya Peraturan turunan/pelaksanaan dari Peraturan daerah tentang Pemberian Fasilitas /insenti Kemudahan Berusaha.
9. Belum adanya Pejabat Fungsional penata Laksana Penanaman Modal/ Pengawas Penanaman Modal.
10. Sebagian Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM dan ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM.
11. Kewenangan untuk pelaporan LKPM ada di kantor pusat perusahaan sehingga untuk lokasi cabang di Kabupaten Balangan tidak memiliki hak akses untuk menyampaikan pelaporan hal ini yang menjadipermasalahan di daerah sehingga laporan terkendala.
12. Belum tersedia sistem informasi investasi yang mudah, interaktif dan komprehensif.

g. Solusi/ Strategi Pemecahan masalah

Solusi/ Strategi Pemecahan masalah dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Balangan.
2. Meningkatkan keikutsertaan event event promosi investasi.
3. Penyusunan peta potensi investasi

4. Menyusun projek investasi sesuai potensi Daerah selain sector pertambangan yang siap ditawarkan ke Investor.
5. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD terkait dalam hal promosi Investasi.
6. Meningkatkan kualitas promosi investasi diluar daerah
7. Membangun system informasi yang memudahkan identifikasi potensi investasi.
8. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
9. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
10. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Menyediakan media informasi terkait potensi Investasi yang komprehensif, terpadu dan mudah diakses.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal dan sumber daya pembiayaan/anggaran. Sumber Daya yang terlibat langsung secara teknis dalam Sub Koordinator Penanaman Modal berjumlah 3 Orang ASN (Analisis Kebijakan Ahli Madya), 1 Orang Tenaga Pendamping dari Kementerian Investasi dan 7 Orang Tenaga Harian Lepas/Kontrak.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah jumlah sumberdaya yang dikeluarkan, maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi. Pencapaian sasaran Tahun 2024 telah menunjukkan tingkat **efisiensi baik dari capaian kinerja maupun anggaran** sebagaimana table berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Sasaran

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Investasi Daerah	610 M	724,11M	118,71	1.503.614.700	1.271.821.858	91,36

Dari table dapat dilihat bahwa sebagian besar sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerja nya. Berarti pencapaian dari aspek program telah tercapai dengan cara **efisiensi anggaran**, bahkan capaian kinerja nya sangat signifikan jauh lebih besar yaitu mencapai 117,91%. Ini menggambarkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran sangat **Efektif**, sementara dari segi penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran telah mencukupi dan **efisien**. Ini sejalan dengan prinsip Pemerintah yang baik salah satunya pengelolaan Anggran yang efisien.

i. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Pada poin sebelumnya telah dijelaskan beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran kinerja. Pada poin ini akan sedikit dijelaskan mengenai Program dan Kegiatan yang meunjang pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	2 Potensi	2 Potensi	100
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Perda	1 Perda	100
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	400 Milyar	17883.379 Milyar	4
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan	1 Proyek	1 Proyek	100
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perda	2 Perda	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	90%	92.63 %	102.92
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	100	196	196
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	297 Pelaku Usaha	118.8
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	42 Kegiatan Usaha	132

2. Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi

Sasaran Kedua adalah Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kemudahan Berusaha. Ini merupakan Sasaran dan Indikator baru hasil reviu oleh Kemenpan RB.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

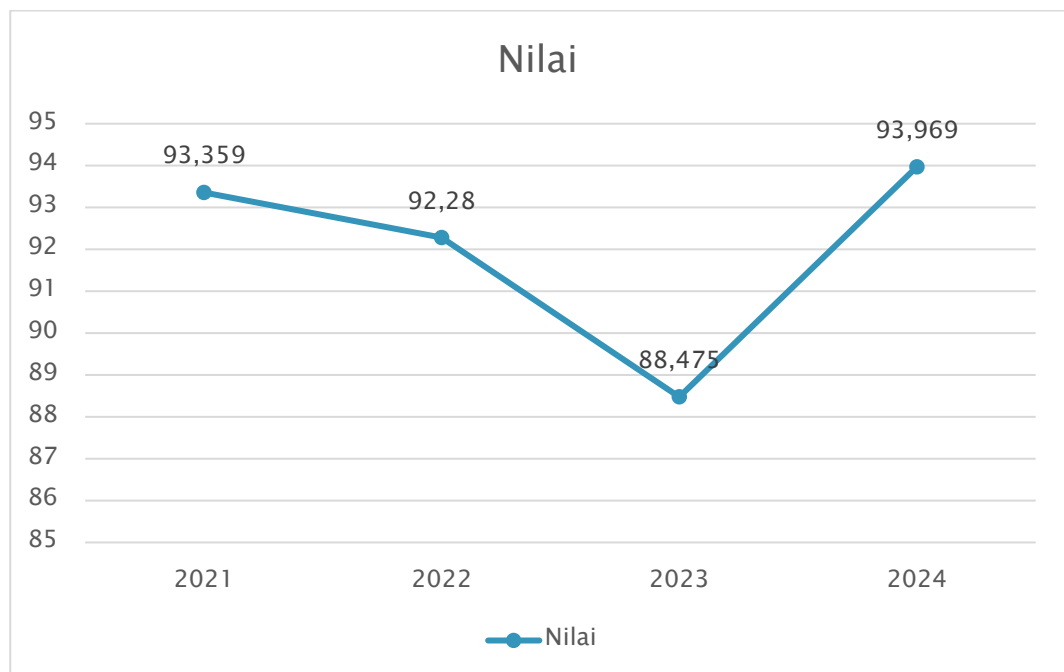
Tabel 3.10 Perbandingan antara Target dan Indeks Kemudahan Berusaha/ Berinvestasi Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	88.50	93.969	106,18%	Sangat Memuaskan

Dari tabel di atas, indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan untuk tahun 2024 target Indeks Kemudahan Berinvestasi/Berusaha yang telah disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 88,50 dengan realisasi sebesar **93,969** hasil dari penilaian Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha oleh Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2024. Tingkat capaian kinerja mencapai **106,18%** dan dapat dikategorikan Sangat Memuaskan

b. Perbandingan dengan Nilai Tahun sebelum nya 2021 s.d 2024

Grafik 3.3 Peningkatan Nilai



Berdasarkan grafik capaian dari Tahun 2021 s.d 2024 Kemudahan Berusaha yang diukur melalui Nilai yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI mengalami tren yang meningkat. Peningkatan significant terjadi pada Tahun 2024 yang meningkat sebesar... poin dari Tahun 2023.

c. Perbandingan terhadap target Akhir Renstra

Tabel 3.11 Capaian Indikator Indeks Kemudahan Berusaha/Berinvestasi

Indikator	2023	2024		Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2024 thdp 2026
	Realisasi	Target	Realisasi		
Indeks Kemudahan Berusaha/ Berinvestasi	88,475	88,500	93,969	106.18%	Sangat Memuaskan 106.18%

Dari tabel di atas, indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan untuk tahun 2024 target Indeks Kemudahan Berinvestasi/Berusaha yang telah disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 88,50 dengan realisasi sebesar **93,969** hasil dari penilaian Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha oleh Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2024.

d. Perbandingan dengan Kabupaten se Indonesia

Tabel 3.12 Perbandingan Nilai dengann Kabupaten Skala Nasional

No	Kabupaten	Nilai PTSP	Nilai PPB	Total Nilai
1	Semarang	95.840	100.000	97.296
2	Badung	97.400	95.600	96.770
3	Gresik	96.680	94.800	96.022
4	Cianjur	98.000	92.200	95.970
5	Dharmasraya	93.760	100.000	95.944
6	Sragen	93.393	100.000	95.705
7	Siak	96.067	94.900	95.659
8	Asahan	95.360	94.200	94.954
9	Karanganyar	93.068	97.900	94.759
10	Wonogiri	93.338	97.000	94.620
11	Gianyar	92.785	97.900	94.575
12	Balangan	94.868	92.300	93.969
13	Temanggung	90.547	99.400	93.646
14	Madiun	96.080	88.000	93.252
15	Grobogan	92.707	94.200	93.230

Dari Tabel ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Balangan berada pada peringkat 12 dari 417 Kabupaten se Inonesia dengan Nilai 93,969. Peringkat ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya menduduki Peringkat 28 Nasional dengan Nilai 88,488.

Tabel 3.13 Perbandingan dengan Kabupaten lain di Kalimantan Selatan

Peringkat Nasional	Kabupaten	Nilai PTSP	Nilai PPB	Total
12	Balangan	94.868	92.300	93.969
21	Tanah Bumbu	90.028	97.600	92.678
47	Hulu Sungai Tengah	87.956	91.300	89.126
97	Hulu Sungai Selatan	88.798	73.600	83.479
158	Banjar	79.048	72.900	76.896
170	Kotabaru	80.328	67.300	75.768
204	Tabalong	78.388	61.700	72.547
219	Tapin	82.340	48.800	70.601
222	Barito Kuala	82.187	47.800	70.152
308	Tanah Laut	75.248	35.500	61.336
338	Hulu Sungai Utara	65.658	41.100	57.063

<https://penilaiankinerja.bkpm.go.id:2083/#/dashboard>

Pada level Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan masih menduduki Peringkat 1 mempertahankan capaian Tahun sebelumnya yang juga dengan peringkat yang sama.

e. Analisis Faktor-faktor yang menunjang pencapaian Sasaran kinerja :

Faktor yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif /Fasilitas Kemudahan Berusaha

Gambar 3.15 Penyusunan Pedoman Teknis Pemberian Insentif Kemudahan Berusaha



2. Dibentuknya Tim Koordinasi Teknis Perizinan/PTSP yang secara berkala melakukan rapat Tim Teknis dalam rangka evaluasi pelaksanaan/ pelayanan perizinan yang dilakukan.

Gambar 3.16 Rapat Tim Koordinasi Teknis Perizinan



3. Meningkatnya pelayanan data dan informasi perizinan/ penanaman modal dengan jumlah 115 jenis layanan sudah terintegrasi secara online.
4. Standar operasional prosedur perizinan berusaha sudah sesuai kewenangan serta peraturan perizinan berusaha sudah terintegrasi secara elektronik.
5. Penyederhanaan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
6. Penataan kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Balangan sudah menyesuaikan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021.
7. Keberhasilan Inovasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Tahun 2024 seperti Lantunan Shalawat Takwa dan Lapak Jiwa.

f. Analisis Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam meningkatkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Belum optimalnya peran Tim Pengawas PTSP
2. Lama nya proses pembahasan produk hukum daerah tentang pemberian fasilitas/insentif kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
3. Belum adanya Mal Pelayanan Publik.

4. Belum adanya regulasi daerah tentang jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten.
5. Peta potensi investasi /profil peluang investasi di Kabupaten belum dapat diakses secara digital sehingga kesulitan bagi calon investor untuk berminat berinvestasi.
6. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA masih dirasa sulit bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro.

g. Solusi/ Strategi Pemecahan masalah

Solusi/ Strategi Pemecahan masalah dalam meningkatkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Mengoptimalkan peran Tim Pengawas PTSP
2. Reviu SOP tentang pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah
3. Percepatan proses produk hukum daerah tentang pemberian fasilitas/insentif kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
4. Akselerasi percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik.
5. Mengusulkan regulasi daerah tentang jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten.
6. Membangun system profil peluang investasi yang mudah diakses investor luar.
7. Integrasi sistem dan data antar Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang telah mendelegasikan kewenangan izin nya.
8. Penyesuaian terhadap SOP dan SPP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
9. Pengembangan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
10. Pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepadamasyarakat.
11. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
12. Koordinasi dan sinkronisasi DPMTSP dengan Perangkat Daerah Teknis dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
13. Proses dokumen pemenuhan komitmen perlu koordinasi dengan Instansi Teknis terkait pelimpahan izin (alur, form, pengesahan rekomendasi, integrasi jika Instansi tersebut telah memiliki sistem).

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal dan sumber daya pembiayaan/anggaran. Sumber Daya yang terlibat langsung secara teknis dalam Sub Koordinator Pelayanan Perizinan berjumlah 6 Orang ASN (Analisis Kebijakan Ahli Madya) dan Tenaga Pelayanan Front Office.

Pencapaian sasaran kemudahan berinvestasi Tahun 2024 telah menunjukkan tingkat **efisiensi baik dari capaian kinerja maupun anggaran** sebagaimana table berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Sasaran

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi/Berusaha	88.5	93,969	106.18	970.206.620	878.762.083	91

Dari table dapat dilihat bahwa sebagian besar sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Berarti pencapaian dari aspek program telah tercapai dengan cara **efisiensi anggaran**, bahkan capaian kinerjanya sangat signifikan jauh lebih besar yaitu mencapai 106,18%. Ini menggambarkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran sangat **Efektif**, sementara dari segi penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran telah mencukupi dan **efisien**. Ini sejalan dengan prinsip Pemerintah yang baik salah satunya pengelolaan Anggaran yang efisien.

i. Analisis Program yang menunjang Keberhasilan

Pada poin sebelumnya telah dijelaskan beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran kinerja. Pada poin ini akan sedikit dijelaskan mengenai Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja meningkatnya kemudahan berusaha/berinvestasi di Kabupaten Balangan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15 program penunjang keberhasilan

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	92.75 Nilai	94.05 Nilai	101.4
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	100%	100
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	2042 Pelaku Usaha	170.17
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	175 Pelaku Usaha	278 Pelaku Usaha	158.86
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	700 Pelaku Usaha	2186 Pelaku Usaha	312.29
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Dikelola Secara Elektronik	100%	100%	100
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	100%	100%	100

3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat diangka 94,05 atau kategori Sangat Memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Balangan sudah Sangat Memuaskan dan berpengaruh pada capaian meningkatnya kemudahan berusaha/berinvestasi. *Sebagaimana dijelaskan pada BAB II bahwa Sasaran ini merupakan sasaran kinerja taktikal yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II. Sebelum hasil review oleh Kemenpan pada Tahun 2023 sasaran ini merupakan salah satu sasaran Strategis SKPD.*

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Adapun capaian kinerja untuk sasaran ini sebagaimana pada tabel berikut:

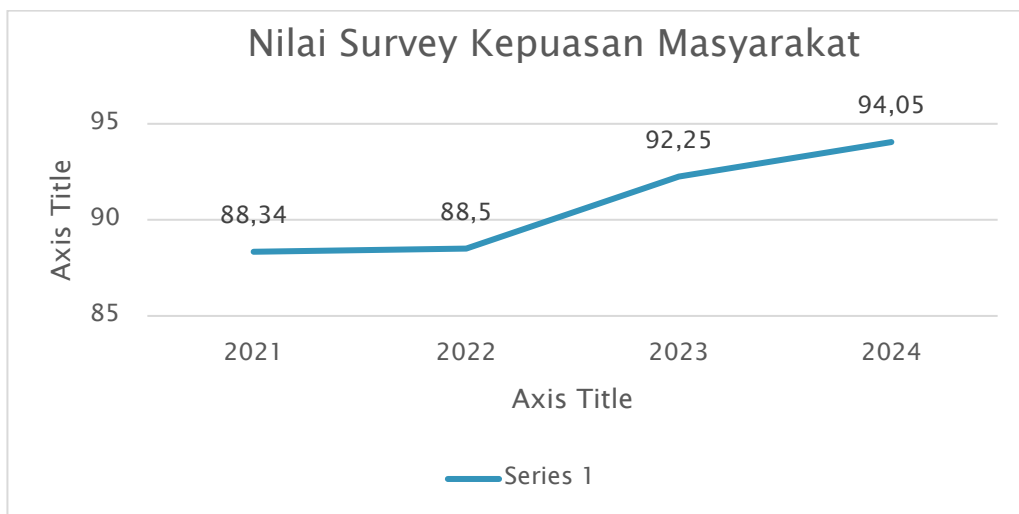
Tabel 3.16 Capaian Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	2024			Kategori Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,75	94,05	102.33%	Sangat Memuaskan

Dari tabel di atas dari indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan untuk tahun 2024 target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,75% dengan realisasi sebesar **94,05%**. Dari hasil capaian dapat dikategorikan **Sangat Memuaskan**.

b. Perbandingan Nilai SKM dengan Tahun sebelum nya 2021 s.d 2024

Grafik 3.4 Nilai SKM



c. Perbandingan terhadap target Akhir Renstra

Tabel 3.11 Capaian Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator	2023	2024		Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2024 thdp 2026
	Realisasi	Target	Realisasi		
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	92,25	92,75	94,05	102.33%	Sangat Memuaskan 102.33%

Dari tabel di atas, indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada masa akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

d. Analisis Faktor-faktor yang menunjang pencapaian Sasaran kinerja :

Faktor yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara perizinan melalui Bimbingan Teknis Service Excellence sehingga menjadikan lebih professional dalam melayani.

Gambar 3.17 Kegiatan Pelatihan Excellent Service



2. Penyederhanaan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui Aplikasi berikut:
- OSS RBA:** Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS adalah satu – satunya aplikasi perizinan berusaha, mulai dari usaha mikro sampai dengan besar. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada masing – masing wewenang (Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat) sesuai peraturan yang berlaku untuk menyelesaikannya.

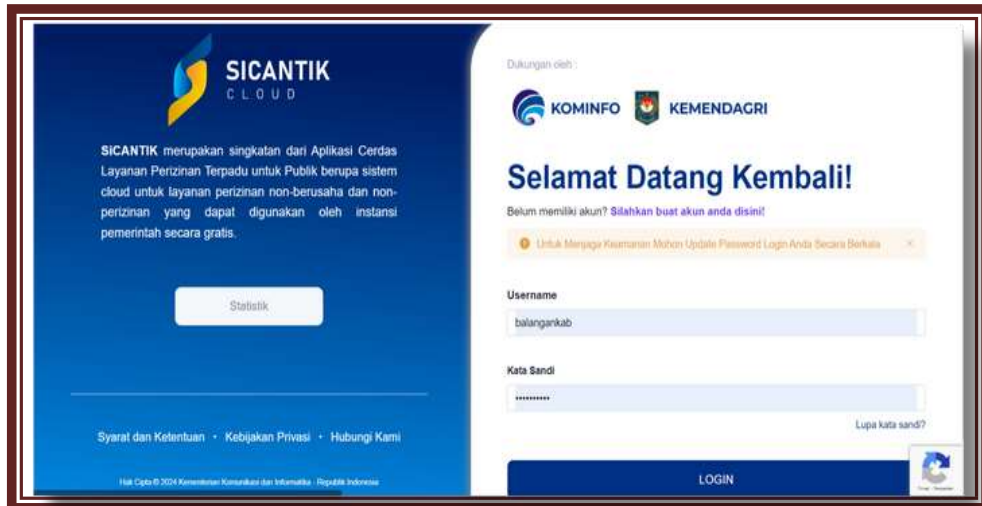
Gambar 3.18 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online



b. Si Cantik : Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik

SiCantik adalah aplikasi semi open source yang disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk memproses perizinan non berusaha. Aplikasi ini bisa di sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten / Kota masing – masing daerah.

Gambar 3.19 Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik



c. Aplikasi SIMBG

Aplikasi SIMBG merupakan aplikasi online terintegrasi yang dipergunakan untuk melayani dan memproses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).



Gambar 3.20 Aplikasi SIMBG

d. MPP Digital

MPP Digital adalah Platform yang diluncurkan oleh Kementerian PANRB

Gambar 3.21 Aplikasi MPP Digital



4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal dan sumber daya pembiayaan/anggaran. Sumber Daya yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 15 Orang PNS, 1 Orang PPPK, serta Tenaga Kontrak .

Dalam rangka meningkatkan efektifitas belanja, pada Tahun 2024 dilakukan refocusing dan realokasi belanja pada penyusunan anggaran perubahan untuk mensupport pencapaian sasaran strategis SKPD diantaranya adalah:

1. Belanja rutin Belanja Tenaga Administrasi.
2. Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Belanja jasa konsultasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi

Beberapa belanja diatas dialihkan untuk kegiatan- kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran SKPD dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat seperti:

1. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional untuk Petugas Pelayanan/Penata Perizinan.
2. Belanja Sarana dan Prasarana Seperti Laptop dan PC
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan
4. Belanja Penyusunan Kajian Potensi Investasi
5. Belanja Aplikasi Datupentas
6. Pelatihan Service Excellence bagi Petugas Pelayanan
7. Bimtek Penanaman Modal
8. FGD Pengawasan Penanaman Modal

C. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Anggaran secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk unsur pendapatan target kinerja dilihat dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan target belanja dapat dilihat dari Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

4. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menargetkan pendapatan sebesar Rp.530.000.000,- dengan rincian dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp.500.000.000,- dan Hasil Sewa BMD sebesar Rp.30.000.000,-. Adapun rincian realisasi pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18 realisasi pendapatan DPMPTSP Tahun 2024.

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp 500.000.000,00	Rp 586.713.571,00	117,34%
2	Hasil Sewa BMD	Rp 30.000.000,00	Rp 76.770.000,00	255,90%
	Total	Rp 530.000.000,00	Rp 663.483.571,00	125,19%

Realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp. 663.483.571,00 bersumber dari retribusi melalui pungutan PBG sebesar 586.713.571 dan Hasil Sewa BMD sebesar Rp.76.770.000,00. Realisasi pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada 2023.

5. Realisasi Belanja

Realisasi anggaran belanja terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yaitu berupa program dan Kegiatan pembangunan yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Kinerja pelaksanaan program dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi.

Tabel 3.19 Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun 2024:

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,747,275,042	8,827,521,450	90.56	919,753,592
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265,087,000	252,188,210	95.13	12,898,790
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69,502,000	68,918,658	99.16	583,342
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	31,755,000	30,671,000	96.59	1,084,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	163,830,000	152,598,552	93.14	11,231,448
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,521,513,642	5.043.401.019	91.34	478.112.623
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,861,167,082	4.406.816.399	90.65	454.350.683
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	576,047,560	552,792,708	95.96	23,254,852
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49,127,000	48,771,720	99.28	355,280
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35,172,000	35,020,192	99.57	151,808
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	442,762,000	358,490,082	80.97	84,271,918
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	183,962,000	172,900,000	93.99	11,062,000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	258,800,000	185,590,082	71.71	73,209,918
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,699,415,800	1,612,188,945	94.87	87,226,855
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43,940,000	42,861,000	97.54	1,079,000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	840,058,400	823,475,000	98.03	16,583,400
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86,862,000	68,683,300	79.07	18,178,700
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,118,400	9,840,000	97.25	278,400
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	718,437,000	664.345.245	92.47	54.091.755
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243,190,500	239,100,000	98.32	4,090,500

15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126,000,000	124,200,000	98.57	1,800,000
16	Pengadaan Mebel	117,190,500	114,900,000	98.05	2,290,500
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590,615,100	501,763,462	84.96	88,851,638
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228,548,400	198,571,162	86.88	29,977,238
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,066,700	303,192,300	83.74	58,874,400
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984,691,000	819,469,732	83.22	165,221,268
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	491,754,000	367,247,150	74.68	124,506,850
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492,937,000	452,222,582	91.74	40,714,418
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	320,622,000	297,355,274	92.74	23,266,726
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	69,766,000	58,019,674	83.16	11,746,326
21	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	38,766,000	31,575,744	81.45	7,190,256
22	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	31,000,000	26,443,930	85.30	4,556,070
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	250,856,000	239,335,600	95.41	11,520,400
23	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	129,906,000	123,707,200	95.23	6,198,800
24	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	120,950,000	115,628,400	95.60	5,321,600
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	521,783,700	454,057,546	87.02	67,726,154
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	521,783,700	454,057,546	87.02	67,726,154
25	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	219,565,300	174,715,770	79.57	44,849,530
26	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	302,218,400	279,341,776	92.43	22,876,624
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	822,511,620	741,104,030	90.10	81,407,590

11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	822,511,620	741,104,030	90.10	81,407,590
27	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	393,645,420	369,414,565	93.84	24,230,855
28	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	229,342,000	173,517,870	75.66	55,824,130
29	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	199,524,200	198,171,595	99.32	1,352,605
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	661,209,000	520,409,038	78.71	140,799,962
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	661,209,000	520,409,038	78.71	140,799,962
30	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	313,495,000	288,990,555	92.18	24,504,445
31	Pengawasan Penanaman Modal	347,714,000	231,418,483	66.55	116,295,517
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	147,695,000	137,658,053	93.20	10,036,947
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	147,695,000	137,658,053	93.20	10,036,947
32	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	147,695,000	137,658,053	93.20	10,036,947
		12,221,096,362	10,974,200,991	89.80	1,246,895,371

Dari tabel capaian pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 dapat terlihat realisasi belanja Program Dinas PMPTSP Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. **10,974,200,991,-** atau **89,80%** dari pagu sebesar Rp. **12,221,096,362,-** , yang mana dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada Program Pengelolaan Data dan informasi Penanaman Modal yaitu sebesar **93,20 %**. Sementara, penyerapan

anggaran yang terkecil pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu 78,71%, ada 1 Sub Kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 70%, dan 2 Sub Kegiatan yang kurang realisasi keuangannya dari 75%, dan 1 Sub Kegiatan yang kurang realisasi keuangannya dari 80%. Adapun sub kegiatan tersebut, yaitu :

Tabel 3.20 Analisa

NO	SUB KEGIATAN	REALISASI	ANALISA
1	Pengawasan Penanaman Modal	66.55	<p>Pada Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal untuk tahun 2024, ada beberapa item belanja yang kurang maksimal penyerapan anggarannya, antara lain : 1. Belanja makanan dan minuman; 2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Hal ini disebabkan karena point 1 dan 2 tidak terserap anggarannya karena penyelesaian permasalahan yang harusnya dilaksanakan 3 kali, namun hanya dilaksanakan 1 kali sehingga serapan anggaran tidak maksimal. (kurangnya waktu)</p> <p>Pada point 3 yaitu belanja perjalanan dinas dalam kota/ Inspeksi lapangan tidak maksimal penyerapan anggarannya karena pagu anggarannya terlalu besar, sedangkan satuan harga untuk perjalanan dinas dalam kota disesuaikan dengan Perbup, dan lokasi pengawasan sebagian besar berada dalam kecamatan. Pagu anggaran yang besar ini berasal dari dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal yang sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM. Adapun dana DAK yang diberikan tersebut yaitu sebesar Rp. 182.232.000,-.</p>
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.71	<p>Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk tahun 2024, ada beberapa item belanja yang kurang maksimal penyerapan anggarannya, antara lain : Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.</p>

			Hal ini disebabkan karena kebanyakan belanja bimbingan teknis sudah ditanggung oleh BKPSDM Kabupaten Balangan dan juga kurangnya peningkatan bimbingan teknis yang diadakan oleh pihak ke tiga.
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.68	<p>Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, ada beberapa item belanja yang kurang maksimal penyerapan anggarannya, antara lain : 1. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan; 2. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan; 3. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; 4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang.</p> <p>Hal ini disebabkan pagu anggaran pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 masih menyatu dengan dengan dinas tenaga kerja dan BLK, dan beberapa kondisi mesin kendaraan masih baik serta ada mobil operasional yang dikembalikan ke aset, sehingga mengakibatkan banyak anggaran yang tidak terserap.</p>
4	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	75.66	<p>Pada sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko penyerapan anggarannya kurang maksimal disebabkan Item belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus tidak terealisasi.</p> <p>Hal ini karena kontrak untuk belanja jasa konsultasi proses pelaksanaannya terlambat, yang seharusnya dilaksanakan di awal tahun melalui sistem E-Katalog.</p>

D. KINERJA LAINNYA

1. Penghargaan

Selain beberapa capaian kinerja yang telah dituangkan dalam Perencanaan Kinerja pada Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan juga berpartisipasi aktif dan meraih penghargaan dalam beberapa penilaian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga ditingkat Nasional. Penghargaan yang diterima selama Tahun 2024 adalah:

1. Predikat **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** dalam pembangunan Zona Integritas oleh Kementerian PANRB.

Gambar 3.22 Penerimaan Penghargaan WBK



2. Predikat Zona Hijau atas Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik dengan Nilai **Tertinggi (95,41)** oleh Ombudsman RI.

Gambar 3.23 Piagam Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



3. Meraih Predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Gambar 3.24 Piagam Penilaian Kinerja



4. Berkontribusi dalam pencapaian **Top 5 Nasional Kabupaten Terinovatif** dalam IGA Award dengan partisipasi aktif Pamong Inovasi, Inovator serta Admin Inovasi dengan **jumlah 7 (tujuh)** inovasi yang terdaftar pada IGA Tahun 2024.

Gambar 3.25 Piagam Penghargaan Inovasi



5. Runner Up 1 se Kalsel dalam IPRO Challenge 2024 yang dilaksanakan oleh BANK INDONESIA yang tergabung dalam tim RIRU (Regional Investment Relation Unit) Kalsel bersaing dengan 18 proyek yang ditawarkan.

Gambar 3.26 Piagam IPRO



6. SKPD Terbaik dalam Penerapan Budaya Kerja dan Penerapan Core Values dengan Nilai 96, Kategori Sangat Memuaskan oleh Bupati Balangan.

Gambar 3.27 Piagam Budaya kerja dan Penerapan Core Values



7. Agen Perubahan Aktif atas nama Fitri Efendi dan Akhmad oleh Bupati Balangan.

Gambar 3.28 Ageb Perubahan



Gambar 3.29 Piagam Agen Perubahan



8. Finalis ASN Berprestasi Kabupaten Balangan, dimana DPMPSTP menyumbangkan 2 ASN sampai tahap wawancara dan paparan calon ASN Berprestasi Tahun 2024.

Gambar 3.30 ASN Berprestasi

PEMERINTAH SELEKSI CALON ASN BERPRESTASI
DI LINDUNGKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP.	JABATAN	OPS
1.	PUTRI EFENDI, S.Pd, AM	1989102019021001	KETALA BUKU BAGIAN PERENCANAAN DAN MELUNGAN	IBRAH PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	HJUM ARIFIN, S.Pd, M.AP	1971031720011021004	KEPALA BADAN KESEJAHTERAHAN KOMISI	SEKRETARIAT ENERGI
3.	ANWARUDDIYAH, S.Pd, M.M	198112082019012000	JP ANALIS KEBUDAYAAN AHLI BUKU	IBRAH PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	SAHABUDIN, AM	198702172009042000	JP PENYAKIT PERYELA	PLERKORING TANAH HIRANG
5.	MUHAMMAD AL HADAR, AM	198308282019011010	PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LAINLA	IBRAH MODAL
6.	MUHAMMAD FIRMAN, S.ST	198801042009041000	JP SANTAPAN ALUM	KUMAR SAKIT UMUM LAKSANA DITU KANDANG HULU BALANGAN
7.	NETY KURNIAWATI, M.M	198111082007012000	KEPALA DESKAS PELAYANAN PENGANTARAN BPN	IBRAH KEPERAWATAN DAN KEPERAWATAN BPN
8.	IBRAH KURNIA YULIATI, S.Kep.Ners, NIM	198103012008042010	KERJALA BUKING KEPERAWATAN DAN KEPERAWATAN	KUMAR SAKIT UMUM LAKSANA DITU KANDANG HULU BALANGAN
9.	PURYANTI, S.Kep	198108082011011001	ANALIS PENGELOMBANGAN PERSENTA DESK	IBRAH PENGELOMBANG DAN KEBUDAYAAN
10.	SUKIRMA, S.Sos, MPA	198012082019011010	JP ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI BUKU	IBRAH KEPERAWATAN DAN PENGELOMBANG SUMBER DAYA MANUSIA

Kabupaten BALANGAN
H. SUPRIANDI, S.Sos, M.AP
Pengarah Utama Mada
NIP. 19610102198001000

9. Meraih Nilai 82,25 Indeks Proferinalisme ASN Lingkup SKPD oleh Bupati Balangan.

Gambar 3.31 Piagam Indeks Profesionalisma ASN Lingkup SKPD


Piagam Penghargaan
 Nomor: 800/455/3KPSDA-BLG/2024
FEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 Memberikan Penghargaan kepada:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Atas capaian hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawainan Negara dengan nilai 82,25 dalam kategori TINGGI.

Parangin, 15 Agustus 2024
Bupati Balangan,
H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Jumlah ASN	Kategori	Capaian	Average	Skor
10	24,00	21,00	23,00	5,00


 H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

2 .Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada Tahun 2024 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

a. Inovasi Lantunan Salawat Takwa

Inovasi Lantunan Salawat Takwa adalah Layanan berbantuan melalui wa (whatsAap) yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik kepada pelaku usaha dalam proses mendapatkan izin usaha tanpa batas waktu yang ditentukan.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk pengurusan perizinan berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Pelaku usaha mendapatkan layanan berbantuan yang Sangat Memuaskan dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- Layanan berbantuan perizinan berusaha melalui aplikasi whats App selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Layanan Berbantuan Perizinan Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 {(dua puluh empat) jam.
- Menghidari tatap muka langsung antara pelaku usaha dengan penyelenggara pelayanan publik, dan
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

b. Inovasi Lapak Jiwa

Inovasi Lapak Jiwa ini merupakan inovasi yang dikembangkan dari bentuk komvensional ke online melalui wa untuk memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat berkaitan dengan syarat dan prosedur dalam proses pelayanan perizinan berusaha dan berusaha dan juga untuk mengukur kinerja dari pelayanan publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan inovasi ini antara lain :

- Masyarakat dan Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan konsultasi terkait pengurusan perizinan berusaha dan non berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Masyarakat dan Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan konsultasi yang Sangat Memuaskan dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- Layanan Pendampingan Konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Pendampingan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 {(dua puluh empat) jam.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

c. Inovasi Lading Asah Batu

Inovasi Lading Asah Batu adalah pemberian fasilitas kemudahan Pelayanan Perizinan berusaha bagi pelaku usaha berupa pendampingan yang diberikan oleh unit pelayanan publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. untuk memudahkan dalam proses layanan perizinan melalui sistem aplikasi online melalui WA tanpa batas waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dan juga layanan pendampingan perizinan berusaha ini tidak mengenal waktu libur (sabtu dan minggu).

Keuntungan layanan ini antara lain :

- Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk pengurusan perizinan berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan yang Sangat Memuaskan dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- Layanan Pendampingan perizinan berusaha selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Pendampingan Layanan Perizinan Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 {(dua puluh empat) jam.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

d. Inovasi Ladang Porang Paman Linbat

Inovasi Ladang Porang Paman Linbat adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan layanan pendampingan secara online melalui WA (WhatsApp) dalam pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha (investor) yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan inovasi ini antara lain :

- Para pelaku usaha (investor) tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Pelaku usaha (investor) mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal yang Sangat Memuaskan dan prima oleh petugas penyelenggara pelayanan dalam proses perizinan berusaha penanaman modal.
- Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa batas waktu.
- Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu full 24 (dua puluh empat) jam.
- Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

e. Inovasi Awas Nasa Jebol

Inovasi Awas Nasa Jebol adalah merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang merupakan kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban dari pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- Pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mengenai langsung kepada pelaku usaha (investor) karena pengawasan dilaksanakan langsung ke tempat pelaku usaha.
- Agar realisasi investasi di Kabupaten Balangan lebih meningkat.
- Agar Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini memberi manfaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Balangan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dari izin usaha yang telah dimiliki.

f. Inovasi Batutukar

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan- pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utililitas, dan lainnya.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Balangan adalah salah satu instansi publik yang memberikan pelayanan jasa secara langsung melalui pelayanan perizinan dan non perizinan. Demikian juga dalam sector penanaman modal yang mana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Balangan melalui fasilitasi UMKM dan pengawasan pelaku usaha. Salah satu upaya fasilitasi yang dibuat adalah menyediakan sebuah aplikasi belanja online bernama BATUTUKAR. Aplikasi ini dibuat pada saat awal-awal masuknya pandemic covid di Kabupaten Balangan. Keberadaan pandemic covid yang sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan manusia berimbas pada roda perekonomian dunia, termasuk juga di Indonesia dan Kabupaten Balangan pada khususnya. Kondisi perekonomian yang sedemikian sepi, dimana transaksi jual beli sangat lemah dikarenakan larangan berkumpul dan bertatap muka untuk meminimalisir peredaran covid 19, memunculkan tren baru dimasyarakat yaitu berbelanja secara online, dan pembayaran non tunai. Melihat dampak pandemic yang sedemikian dahsyat bagi perekonomian terutama pelaku usaha kecil dan menengah , DPMPTSP dalam hal ini bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal berinisiatif memfasilitasi wadah promosi dengan membuat aplikasi berbelanja online.

Sebelum adanya inovasi kegiatan promosi UMKM sebagian besar bertumpu pada sarana pameran-pameran yang diadakan oleh dinas-dinas teknis terkait. Tidak dipungkiri keikutsertaan produk UMKM dalam berbagai pameran merupakan sarana promosi yang sangat berpengaruh untuk mengenalkan brand dan produk dari Kabupaten Balangan terutama pameran yang skalanya besar. Akan tetapi sarana promosi ini tidak dapat membawa semua UMKM sekaligus. Selanjutnya dengan munculnya pandemic covid-19

semakin mematkan promosi yang sifatnya seperti ini karena larangan tatap muka dan beraktifitas diluar rumah. Pandemi covid-19 menghantap semua sector masyarakat, akan tetapi kebutuhan selama masa pandemic covid masih tetap bahkan cenderung meningkat sehingga perlu sarana promosi yang luas, aman dan tetap menaati protocol kesehatan. Sehingga dipikirkan belanja online sebagai sarana promosi dan penjualan.

E. RENCANA AKSI ATAS LHE SAKIP INSPEKTORAT

Tabel 3.21 Tindak Lanjut LHE

No	Aspek Yang Dinilai	Temuan	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Perencanaan	Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai karena sasaran dan indikatornya belum selaras dengan pohon kinerja dan cascading	Untuk membuat Dokumen Perencanaan Kinerja yang sasaran dan indikatornya selaras dengan Pohon Kinerja dan Cascading	Sudah ditindaklanjuti dalam Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 dan proses penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
		Kualitas rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu pada pemilihan kata pada tujuan belum berorientasi hasil karena menggunakan kata "Meningkatkan".	Untuk membuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan menggunakan kata yang berorientasi hasil seperti "Menigkatnya", "Terwujudnya", "Tercapainya" dan lain sebagainya	Sudah ditindaklanjuti dalam Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 dan proses penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
2	Pengukuran	Nihil	Nihil	

3	Pelaporan	Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum memberikan informasi mengenai perbandingan target dan realisasi atas capaian kinerja tahun evaluasi dan tahun-tahun sebelumnya (n-1), (n-2) dan seterusnya selama 1 periode RPJMD/Renstra	Memuat informasi mengenai perbandingan target dan realisasi atas capaian kinerja tahun evaluasi dan tahun-tahun sebelumnya (n-1), (n-2) dan seterusnya selama 1 periode RPJMD/Renstra pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Sudah ditindaklanjuti dalam penyusunan Dokumen LkjIP Tahun 2024
		Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi mengenai hambatan/kendala atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	Memuat informasi mengenai hambatan/kendala atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	berdasarkan hasil asistensi oenyusunan LKj dengan tim kemenpan RB bahwa yang perlu disajikan adalah sasaran startegis dan program kegiatan yg mendukung saja
		Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi mengenai target kinerja dan anggaran dengan realisasi dari pegawai untuk mendukung capaian sasaran strategis sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai	Memuat informasi mengenai gambaran umum tentang target kinerja dan anggaran dengan realisasinya dari pegawai untuk mendukung capaian sasaran strategis SKPD pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	berdasarkan hasil asistensi oenyusunan LKj dengan tim kemenpan RB bahwa yang perlu disajikan adalah sasaran startegis dan program kegiatan yg mendukung saja

		Informasi dalam laporan kinerja berkala belum memberikan informasi mengenai realisasi target kinerja yang telah ditetapkan yang aktivitasnya dilaksanakan meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan	Memuat informasi mengenai gambaran umum tentang realisasi terkait target kinerja pegawai yang telah ditetapkan yang aktivitasnya dilaksanakan meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Sudah ditindaklanjuti dalam penyusunan Dokumen LkjIP Tahun 2024 dan pada LkjIP Tahun 2023 pun sudah ada disajikan informasi dimaksud
		Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan gambaran umum mengenai capaian target kerja pegawai dan efisiensi serta efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan komitmen pegawai serta rekomendasi/perbaikan jika terdapat kendala/hambatan.	Memberikan gambaran umum mengenai capaian target kerja pegawai dan efisiensi serta efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan komitmen pegawai serta rekomendasi/perbaikan jika terdapat kendala/hambatan pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Berdasarkan hasil asistensi oenyusunan LKj dengan tim kemenpan RB bahwa yang perlu disajikan adalah sasaran startegis dan program kegiatan yg mendukung
4	Evaluasi	Peningkatan implementasi SAKIP belum terjadi secara signifikan karena masih terdapat Rekomendasi atas LHE SAKIP SKPD pada tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	Sudah ditindaklanjuti dalam penyusunan Dokumen LkjIP Tahun 2024

Bab 4 Berisi :

- 1. Kesimpulan*
- 2. Rencana Tindak Lanjut*

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedu indikator sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dengan kategori capaian **Sangat Memuaskan**, yaitu: indeks kemudahan berinvestasi dan Nilai Realisasi Investasi.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan realisasi Investasi Daerah dengan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2024 sebesar 719,226 Milyar atau capaian kinerja sebesar 117,91%.
 - b. Meningkatkan kemudahan berusaha dengan Indeks Kemudahan Berinvestasi tahun 2024 sebesar 93,969 dengan capaian kinerja 106,33% .
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan telah melakukan **efisiensi** anggaran sebesar **Rp. 1,246,895,371,-**.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Meskipun kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan pada awal tahun; dan
3. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.
5. Pembenahan pada Bidang/Urusan Penanaman Modal untuk mewujudkan Investasi yang berkelanjutan dengan langkah:
 - a. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Balangan.
 - b. Meningkatkan keikutsertaan event event promosi investasi.
 - c. Menyusun proyek investasi sesuai potensi Daerah selain sector pertambangan yang siap ditawarkan ke Investor.
 - d. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD terkait dalam hal promosi Investasi.
 - e. Meningkatkan kualitas promosi investasi diluar daerah
 - f. Membangun system informasi yang memudahkan identifikasi potemsi investasi.
 - g. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
 - h. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
 - i. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.
 - j. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis untuk memastikankepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
 - k. menyediakan media informasi terkait potensi investasi yang komprehensif, terpadu dan mudah diakses.
 - l. Mengoptimalkan peran Tim Pengawas PTSP
 - m. Reviu SOP tentang pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah
 - n. Percepatan proses produk hukum daerah tentang pemberian fasilitas/insentif kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
 - o. Akselerasi percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik.

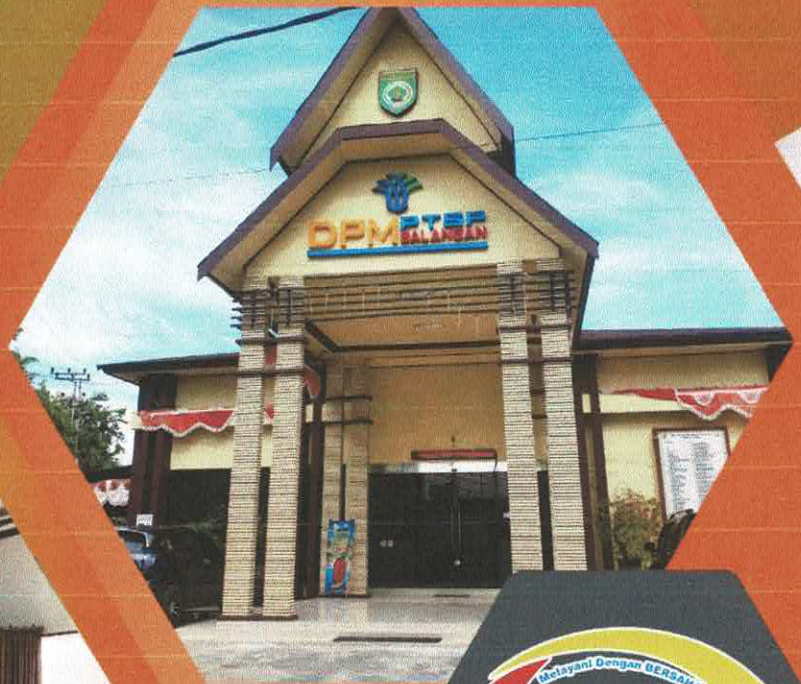
- p. Mengusulkan regulasi daerah tentang jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten.
- q. Membangun system profil peluang investasi yang mudah diakses investor luar.
- r. Integrasi sistem dan data antar Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang telah mendelegasikan kewenangan izin nya.
- s. Penyesuaian terhadap SOP dan SPP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dannon perizinan.
- t. Pengembangan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
- u. Pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepadamasyarakat.
- v. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
- w. Koordinasi dan sinkronisasi DPMTSP dengan Perangkat Daerah Teknis dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
- x. Proses dokumen pemenuhan komitmen perlu koordinasi dengan Instansi Teknis terkait pelimpahan izin (alur, form, pengesahan rekomendasi, integrasi jika Instansi.

Daftar Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- 2. Pohon Kinerja**
- 3. Casceding DPMPTSP**
- 4. SK Indikator Kinerja Utama**
- 5. Pengukuran Kinerja**
- 6. Notulen Asistensi Menpan**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DR. AKHRIANI, S. Pd, M. AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

Jabatan : **BUPATI BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pihak Pertama,

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

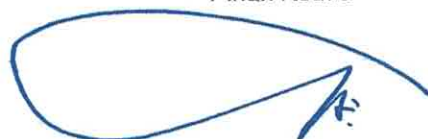
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Nilai realisasi investasi	610 M
2	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	88,5
3	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	92,75 (A)

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.578.459.476,00	Rp 9.747.275.042,00	APBD Perubahan
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 237.322.000,00	Rp 320.622.000,00	APBD Perubahan
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 492.902.900,00	Rp 521.783.700,00	APBD Perubahan
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 165.448.000,00	Rp 661.209.000,00	APBD Perubahan
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 413.362.000,00	Rp 822.511.620,00	APBD Perubahan
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 212.895.000,00	Rp 147.695.000,00	APBD Perubahan
Jumlah		Rp 11.100.389.376,00	Rp 12.221.096.362,00	

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pihak Pertama



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AGUS MUSLIM, ME**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,

Drs. AGUS MUSLIM, ME
NIP. 19730823 199403 1 006



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72 (BB)
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	90%


Pihak Kedua
Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama



Drs. AGUS MUSLIM, ME
NIP. 19730823 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HELMI RAHMAN, A.Md**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. AGUS MUSLIM, ME**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua

Drs. AGUS MUSLIM, ME
NIP. 19730823 199403 1 006

Pihak Pertama,

HELMI RAHMAN, A.Md
NIP. 19840418 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 455.262.000,00	Rp 442.762.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 161.462.000,00	Rp 183.962.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 293.800.000,00	Rp 258.800.000,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 749.680.400,00	Rp 1.699.415.800,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 43.940.000,00	Rp 43.940.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Rp 840.058.400,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 73.402.000,00	Rp 86.862.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.118.400,00	Rp 10.118.400,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 622.220.000,00	Rp 718.437.000,00	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Rp 243.190.500,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Rp 126.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	-	Rp 117.190.500,00	

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 928.822.700,00	Rp 590.615.100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 371.481.000,00	Rp 228.548.400,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 557.341.700,00	Rp 362.066.700,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 937.312.200,00	Rp 984.691.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 531.144.000,00	Rp 491.754.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 406.168.200,00	Rp 492.937.000,00	
	Jumlah	Rp 3.071.077.300,00	Rp 3.717.483.900,00	

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua

Drs. AGUS MUSLIM, ME
NIP. 19730823 199403 1 006

Pihak Pertama

HELMI RAHMAN, A.Md
NIP. 19840418 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SHALIHIN, S.Kom**

Jabatan : **PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HILMI RAHMAN, A.Md**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

HELMI RAHMAN, A.Md
NIP. 19840418 200604 1 009

SHALIHIN, S.Kom
NIP.19961201 202421 1 002

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Database Barang Milik Daerah	Jumlah Database Barang Milik Daerah	12
2	Tersedianya Database Administrasi Kepegawaian	Jumlah Database Administrasi Kepegawaian	12

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua



HELMI RAHMAN, A.Md
NIP. 19840418 200604 1 009

Pihak Pertama



SHALIHIN, S.Kom
NIP.19961201 202421 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRI EFENDI, S.Pd.,MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. AGUS MUSLIM, ME**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua

Drs. AGUS MUSLIM, ME
NIP. 19730823 199403 1 006

Pihak Pertama,

FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
NIP. 19890510 201503 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp 250.925.000,00	Rp 265.087.000,00	APBD Perubahan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 58.740.000,00	Rp 69.502.000,00	APBD Perubahan
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 31.755.000,00	Rp 31.755.000,00	APBD Perubahan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 160.430.000,00	Rp 163.830.000,00	APBD Perubahan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.256.457.176	Rp 5.521.513.642	APBD Perubahan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.594.790.616	Rp 4.861.167.082	APBD Perubahan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.576.117.560	Rp 576.047.560	APBD Perubahan
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 49.127.000	Rp 49.127.000	APBD Perubahan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 36.422.000	Rp 35.172.000	APBD Perubahan
	Jumlah	Rp 6.507.382.176,00	Rp 5.786.600.642,00	

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua



Drs. AGUS MUSLIM, ME
 NIP. 19730823 199403 1 006

Pihak Pertama



FITRI EFENDI, S.Pd., MM
 NIP. 19890510 201503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDI ANSHARI**

Jabatan : **BENDAHARA PENERIMAAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **FITRI EFENDI, S.Pd.,MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
NIP. 19890510 201503 1 001

BUDI ANSHARI
NIP. 19830314 201001 1 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersajinya Laporan Bulanan Penerimaan	Jumlah Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan yang Dianalisa dan Dibuat	12 Laporan
2	Terbuatnya SKR, TBP, dan STS untuk Retribusi Penerimaan	Jumlah SKR, TBP dan STS Retribusi Penerimaan yang dibuat	12 Laporan

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua



FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
NIP. 19890510 201503 1 001

Pihak Pertama



BUDI ANSHARI
NIP. 19830314 201001 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RINA WATI, S. Sos**

Jabatan : **BENDAHARA**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **FITRI EFENDI, S.Pd.,MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua

FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
NIP. 19890510 201503 1 001

Pihak Pertama,

RINA WATI, S. Sos
NIP. 19861006 200701 2 002

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertibnya administrasi keuangan tepat waktu	a. Jumlah dokumen daftar transaksi harian/bulanan	100%
		b. Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional	100%
		c. Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban administratif	100%
		d. Jumlah dokumen buku pembantu pajak	100%
		e. Jumlah dokumen laporan pajak bulanan	100%

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua



FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
NIP. 19890510 201503 1 001

Pihak Pertama



RINA WATI, S. Sos
NIP. 19861006 200701 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISNANINGSIH, S.Kom., MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA I)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,

ISNANINGSIH, S.Kom., MM
NIP. 19801205 201001 2 020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Telaksananya Pengintegrasian Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Online	93 Layanan Perizinan

- No** **Program/Kegiatan**
- 1** **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**
- 1.1** **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

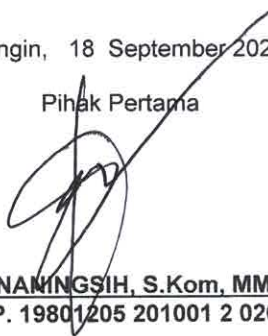
Pihak Kedua



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama



ISNANINGSIH, S.Kom, MM
NIP. 19801205 201001 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERMAWATY,S.Pi, MAP**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PELAYANAN
PERIZINAN NON BERUSAHA)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,

ERMAWATY,S.Pi, MAP
NIP. 197603042 008012014

Pihak Kedua

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (Perizinan Berusaha dan Non Berusaha)	100%
2	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Pihak Pertama



ERMAWATY, S.Pi, M.AP
NIP. 197603042 008012014



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE, MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA II)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,

MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE, MM
NIP. 19780128 201001 2 012



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	700 Pelaku Usaha

- No Program/Kegiatan
- 1 **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko

Pihak Kedua



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama



MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE, MM
NIP. 19780128 201001 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKHMAD,SH,MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN KONSULTASI PERIZINAN)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

AKHMAD,SH,MM
NIP. 19790922 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksanannya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	100%
2	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	175 Pelaku Usaha

No Program/Kegiatan

**1 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL**

**Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu Satu**

**1.1 Pintu di Bidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota**

Penyediaan dan pengelolaan Layanan
Konsultasi perizinan berusaha
berbasis resiko

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Pihak Pertama

AKHMAD, SH, MM
NIP. 19790922 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDIMAH, S.Sos, M.M**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI DPMPSTPTK)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

BUDIMAH, S.Sos, M.M
NIP. 19760520 200604 2 023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola secara elektronik	100%
2	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase updating data dan informasi penanaman modal	100%

No Program/Kegiatan

1 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama

BUDIMAH, S.Sos, M.M
NIP. 19760520 200604 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. M. FIRDAUS HARIADI, S.Sos., MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR DATA DAN KEARSIPAN PERIZINAN)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

H. M. FIRDAUS HARIADI, S.Sos., MM
NIP. 19731024 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	13
2	Terpenuhinya Permintaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Permintaan Data dan Informasi yang Terpenuhi	100%

No Program/Kegiatan

1 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pihak Kedua



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama



H. M. FIRDAUS HARIADI, S.Sos., MM
NIP. 19731024 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUSTI FITRIA YULIANTI, S.Sos**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,

GUSTI FITRIA YULIANTI, S.Sos
NIP. 19830713 201001 2 016

Pihak Kedua



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1 Potensi Investasi
2	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (melalui penerbitan NIB)	100%
3	Tersedianya Dokumen Potensi Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Daerah	1 Dokumen

No Program/Kegiatan

**1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL**

**1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di
Bidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan Oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota

**1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota**

Penyusunan Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama

GUSTI FITRIA YULIANTI, S.Sos
NIP. 19830713 201001 2 016



Pihak Kedua

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 49710228 199702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARIATUL HIDAYAH, S.Pd.I, MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,

MARIATUL HIDAYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 19800312 200701 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	180 Pelaku Usaha
2	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	90%
3	Terlaksananya Pengawasan Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Pemantauan	25 Pelaku Usaha

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha - Pengawasan Penanaman Modal			

Jumlah

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Pihak Pertama



MARIATUL HIDAYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 19800312 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WINDAYANI FACHRIA SANTI, S,Sos,M.AP**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PROMOSI PENANAMAN MODAL)**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 18 September 2024

Pihak Pertama,

WINDAYANI FACHRIA SANTI, S,Sos,M.AP
NIP. 19860126 201001 2 022

Pihak Kedua

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	400 M
2	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	2 Dokumen
3	Terlaksananya Promosi Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan

No Program/Kegiatan

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Paringin, 18 September 2024

Pihak Kedua



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Pihak Pertama



WINDAYANI FACHRIA SANTI, S.Sos.M.AP
NIP. 19860126 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Telp/Fax (0526) 2028114 Paringin 71611
dpmtsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.46/ 017 /SK/DPMPTSP/TAHUN 2024

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188.46/069/SK/DPMPTSPTTK/TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 12 Januari 2024



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU NOMOR : 188.46/017/DPMPTSP-
 BLG/ TAHUN 2024
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DAN INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 BALANGAN TAHUN 2021- 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Adanya indikator ini untuk mengetahui besaran Investasi di Daerah baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) Angka realisasi investasi dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan.	Kepala SKPD	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2	Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berusaha/ Berinvestasi (EoDB)	Adanya indikator ini untuk mengetahui sejauhmana kemudahan perizinan yang diberikan dalam berinvestasi di Kabupaten Balangan Nilai didapat dari hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha yang dikeluarkan oleh BKPM/Kementerian Investasi RI	Kepala SKPD	Nilai Kinerja PTSP dan PPB oleh BKPM

KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BALANGAN,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
 NIP. 197102281997021002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR : 188.46/017/DPMPTSP-BLG/
 TAHUN 2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
 INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA SKPD TAHUN 2021-2026
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Untuk mengetahui Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Sekretaris	LHE AKIP
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	Untuk mengetahui sejauhmana kondisi sarana dan prasarana penunjang SKPD	Sekretaris	Data Aset

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	Mengetahui sector investasi baru yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan iklim investasi	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Dokumen Potensi
2	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Mengetahui sejauhmana kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kewajibannya Jumlah Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM/ Jumlah Pelaku usaha yang wajib melaporkan x 100%	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	OSS
3	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	Mengetahui sejauhmana minat investasi dan besaran rencana investasi di Kabupaten	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Data NIB/ Perizinan Berusaha

			Balangan Nilai Persetujuan Investasi dari pendaftaran NIB		
--	--	--	---	--	--

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan	Mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Dikelola secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang dikelola secara elektronik/Jumlah data dan informasi Penanaman Modal x 100%	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	Layanan Administrasi Keuangan yang Baik		SIPANDA/SIPD RI

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Terfasilitasinya kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	SILKA
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	Persentase Layanan Administrasi	Terfasilitasinya kebutuhan		Bagian Umum dan Kepegawaian

	Umum Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah yang Baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah Sehingga kegiatan pelayanan operasional dapat berjalan dengan lancar		
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Terfasilitasinya kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan		
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	Terfasilitasinya kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan baik Sehingga kegiatan pelayanan operasional dapat berjalan dengan lancar		
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan baik		

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (Berinvestasi)	Mengetahui Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Data dan Informasi
2	Tersedianya Daftar Prioritas Investasi Kabupaten	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Mengetahui Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Peta Potensi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Mengetahui Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	LKPM
2	Meningkatnya Potensi/Proyek Investasi yang	Jumlah Proyek Investasi yang Siap	Mengetahui Jumlah Proyek Investasi yang	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola	Dokumen IPRO

	Siap Ditawarkan	Ditawarkan	Siap Ditawarkan	Penanaman Modal	
--	-----------------	------------	-----------------	-----------------	--

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Jumlah izin seusi SOP/ Jumlah permohonan perizinan x 100%	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	OSS / Si Cantik
2	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi / Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan x 100%	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	OSS / Si Cantik

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kemudahan Investasi	Jumlah Peraturan Daerah Terkait Pemberian Kemudahan Investasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Perda/ Perkada
2	Terfasilitasinya Kemitraan bagi Pelaku Usaha	Jumlah Kesepakatan Kemitraan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah)	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Dokumen Kerjasama

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Dokumen RUPM
2	Terlaksananya Identifikasi Potensi Investasi	Jumlah Potensi Investasi yang Diidentifikasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Peta Potensi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya	Jumlah	Jumlah Pelaku	JF Analis	OSS

	Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha yang Menadapatkan Pembinaan	Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	
2	Terlaksanannya Pengawasan Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pengawasan dan Pemantauan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	OSS

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peta Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Dokumen Strategi
2	Terlaksanannya Promosi Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Laporan

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksanannya Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi

			Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Terpenuhi Komitmen Perizinannya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi
3	Terlaksananya Pelayanan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Mendapatkan Pelayanan Konsultasi Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan yang Diolah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2024



DPMP TSP
DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	78,54%	610 M	719,23 M	118%	1,26 T	52%	Berdasarkan LKPM TW IV
2	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	127,12%	88,5	93,969	106%	89	106%	Realisasi dihitung Tahunan
3	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	104,82%	92,75 (A)	94,05	101%	92,3 (A)	102%	Survey Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Paringin, Desember 2024
Yang melaporkan,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Dt. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIS**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	0	72 (BB)	76,96 (BB)	107%	73	105%	Berdasarkan Nilai SAKIP Tahun 2023
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	101,11%	90%	100%	111%	100%	100%	Sensus BMD



DR. AGUS MUSLIM, ME
NIP. 19730823 199403 1 006

Paringin, Desember 2024
Yang melaporkan
Sekretaris

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tertindakannya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV	
2	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV	

Mengetahui
Sekretaris



Drs. AGUS MUSLIM, ME
NIP. 19730823 199403 1 006

Paringin, Desember 2024

Yang melaporkan
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan



FITRI LENNY, S. Pd, MM
NIP. 19890510 201503 1 001

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
BENDAHARA PENGELUARAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tertibnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	a. Jumlah Dokumen Daftar Transaksi Harian/Bulanan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	Berdasarkan Laporan Keuangan sampai dengan TW IV
		b. Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	Berdasarkan Laporan Keuangan sampai dengan TW IV
		c. Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Administratif	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	Berdasarkan Laporan Keuangan sampai dengan TW IV
		d. Jumlah Dokumen Buku Pembantu Pajak	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	Berdasarkan Laporan Keuangan sampai dengan TW IV
		e. Jumlah Dokumen Laporan Pajak Bulanan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	Berdasarkan Laporan Keuangan sampai dengan TW IV

Mengetahui
Kasubag Perekanaan dan Keuangan


FITRI FEENDI, S.Pd., MM
NIP. 19890510 201503 1 001

Parangin, Desember 2024
Yang Melaporkan

Bendahara


RINA WATI, S. Sos
NIP. 19861006 200701 2 002

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
BENDAHARA PENERIMAAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersajinya Laporan Bulanan Penerimaan	Jumlah Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan yang Dianalisa dan Dibuat	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV
2	Terbuatnya SKR, TBP, dan STS untuk Retribusi Penerimaan	Jumlah SKR, TBP dan STS Retribusi Penerimaan yang dibuat	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV

Mengetahui
Kasubag. Perencanaan dan Keuangan


FITRI EFENDI, S.Pd., MM
NIP. 19890510 201503 1 001

Paringin, Desember 2024
Yang melaporkan
Bendahara Penerimaan


BUDI ANSHARI
NIP. 19830314 201001 1 019

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV	
2	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV	
3	Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV	
4	Tertindakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV	
5	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV	

Mengetahui
Sekretaris



Drs. AGUS MUSLIM, ME
NIP. 19730823 199403 1 006

Paringin, Desember 2024
Yang melaporkan
Kasubag Umum dan Kepegawaian



HELMI RAHMAN, A.Md
NIP. 19830107 200604 2 011

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya database barang milik daerah	Jumlah database barang milik daerah	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV
2	Tersedianya database administrasi kepegawaian	Jumlah database administrasi kepegawaian	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12	100%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV

Mengetahui
Kasubag Umum dan Kepegawaian,


HELMI RAHMAN, A.Md
NIP. 19830107 200604 1 011

Paringin, Desember 2024
Yang melaporkan,
Pranata Komputer Ahli Muda


SHALIHIN, S.Kom
NIP. 19961201 202421 1 002

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	100%	1 Potensi Investasi	1 Potensi Investasi	100%	5 Potensi Investasi	20%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV
2	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (melalui pemberian NIB)	63%	100%	100%	100%	500	0%	Izin Berusaha
3	Tersedianya Dokumen Potensi Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Daerah	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6	17%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV

Paringin, Desember 2024
Yang Melaporkan

Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal



Kepala Dinas
Menteri

DR. AKHRIANI, S.Pd., M.Pd., M.P.A.P.
NIP. 19710228-199702-1 002

GUSTI FITRIA YULIANTI S. Sos
NIP. 19830713 201001 2 016

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
ANALIS KEBIJAKAN/ SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	100%	90%	92,63%	103%	100%	93%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV
1	Tertindakannya Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	108%	180 Pelaku Usaha	297 Pelaku Usaha	165%	600 Pelaku Usaha	50%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV
2	Tertindakannya Pengawasan Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Pemantauan	117%	25 Pelaku Usaha	42 Pelaku Usaha	168%	105 Pelaku Usaha	40%	Berdasarkan Laporan Realisasi sampai Triwulan IV



Paringin, Desember 2024
Yang Melaporkan

JF Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


MARIATUL HIDAYAH, S.Pd, MM
 NIP.19800312 200701 2 005

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
ANALIS KEBIJAKAN/ SUB KOORDINATOR PROMOSI PENANAMAN MODAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	210%	400 M	17883,3 M	4471%	700 M	2555%	Berdasarkan persetujuan Investasi sampai dengan TW IV
1	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	6 Dokumen	33%	Berdasarkan persetujuan Investasi sampai dengan TW IV
2	Terselenggaranya Promosi Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	300%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	6	33%	Berdasarkan persetujuan Investasi sampai dengan TW IV



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, Desember 2024

Yang Melaporkan
Analis Kebijakan Abdi Muda / Sub Koordinator
Promosi Penanaman

WINDAYANI FACHRIA SANTI, S.Sos
NIP. 19860126 201001 2 022

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA II**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW / IV	CAPAIAN (%)			
1	Tertindakannya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	114%	700 Pelaku Usaha	2186 Pelaku Usaha	312%	3000 Pelaku Usaha	73%	Perizinan Beusaha & Non Perizinan



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP.
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, Desember 2024

Yang Melaporkan
Analisis Kebijakan / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan
Berusaha II

MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE
NIP. 19780128 201001 2 012

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (Perizinan Berusaha dan Non Berusaha)	100%	100%	100%	100%	100%	Layanan Perizinan	
2	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	114%	1200 Pelaku Usaha	2042 Pelaku Usaha	170%	3000 Pelaku Usaha	68%	

Paringin, Desember 2024

Yang Melaporkan
Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 196710228 199702 1 002

ERMAWATY, S.Pd., M.AP
NIP. 197603042 008012014

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA I**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW/IV	CAPAIAN (%)			
1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Pelayanan Perizinan	
1	Terterselenggaranya Pengintegrasian Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Online	124%	93 Layanan Perizinan	2552 Layanan Perizinan	2744%	100 Layanan Perizinan	2552%	Layanan Perizinan Terintegrasi

Paringin, Desember 2024

Yang Melaporkan
Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha I



ISMANINGSIH, S.Kom, MM
NIP. 198012012010012020

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN KONSULTASI PERIZINAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Layanan Konsultasi dan Pengaduan	
2	Tersedianya layanan konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	130%	175 Pelaku Usaha	278 Pelaku Usaha	159%	150 Pelaku Usaha	211 layanan Konsultasi dan Pengaduan	



Dr. AKHRIANTI, S.Pd., M.AP
NIP. 197162281997021002

Paringin, Desember 2024

Yang melaporkan
Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Perizinan

AKHMAD, SH, MM
NIP. 197909222009041001

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR DATA DAN KEARSIPAN PERIZINAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	100%	13 Data	13 Data	100%	30 Data	43%	Terintegrasi OSS
2	Terpenuhinya Permintaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Permintaan Data dan Informasi yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Permintaan Data



 Kepala Dinas

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
 NIP. 197310228 199702 1 002

Paringin, Desember 2024
 Yang melaporkan
 Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Data
 dan Kearsipan Perizinan


H. M. FIRDAUS HARADIS, S. Sos., MM
 NIP. 19731024 200604 1 008

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PENELOLAAN SISTEM INFORMASI**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Pelayanan Data dan Sistem	
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Updating Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Data Terupdate	


 Mengetahui
 Kepala Dinas
Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
 NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, Desember 2024
 Yang Melaporkan
 Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator
 Pengelolaan Sistem Informasi

BUDIMAH, S. Sos, MM
 NIP. 19760520 200604 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Paringin. Telp. (0526) 2028060 Fax. (0526) 2028408

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin s/d Selasa, 3 s/d 4 Februari 2025
Waktu : 08.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Best World Kindai Hotel Banjarmasin
Acara : Kegiatan Asistensi Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

I. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

II. Peserta Rapat

Kegiatan Asistensi Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di hadiri oleh Kepala SKPD, Asisten, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan / Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/Pelaksana dan Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan, serta Tim Evaluasi SAKIP Kementerian PANRB.

III. Kesimpulan Hasil Rapat

Kesimpulan hasil Kegiatan Asistensi Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

A. Catatan perbaikan untuk SKPD di Kelas Ibu Hanna :

1. Catatan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:
 - Indikator Perencanaan penjelasan program kegiatan bisa dijelaskan dan ditambahkan lebih padat lagi. Misal dari forum konsultasi publik yang telah dilakukan ini apa saja yang dilakukan.
 - Program kegiatannya dipetakan lagi (hasil evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan bisa disebutkan apa saja).
 - Indikator Indeks Inovasi terkait penjelasan rencana ke depan bisa dijelaskan tentang perlunya penyesuaian target karena realisasi tahun 2024 terhadap target akhir Renstra telah tercapai sehingga bisa dijelaskan lebih detail penyesuaian target ke depannya.
 - Hal-hal yang masih kurang itu yang di dorong untuk dilakukan perbaikan ke depannya.
 - Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian target kinerja sehingga efisiensi bisa tercapai dengan melakukan pemetaan program kegiatan.
 - Jelaskan program kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator sasaran dan atau crosscutting dengan SKPD lain.
 - Lkj bisa ditambahkan foto-foto kegiatan yang dilaksanakan
 - Perbandingan dengan Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional jika ada.



2. Catatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

- Rencana aksi tindaklanjut diperbaiki atau di kasih judul sendiri.
- Anggaran bisa dibuatkan tabel seperti punya Bapperida.
- Kekurangan dan kelebihan dari program belum tergambar dampak dari program kegiatan, apakah mendorong tercapainya sasaran strategis.
- Jelaskan program kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator sasaran dan atau crosscutting dengan SKPD lain.
- Lkj bisa ditambahkan foto-foto kegiatan yang dilaksanakan
- Perbandingan dengan Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional jika ada.



3. Catatan untuk Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- Hal 24 persentase realisasi masih keliru perhitungannya.
- Dijelaskan lebih detail perubahan PK terkait perubahan indikator yang awalnya 5 menjadi 4 pada Bab Perencanaan.
- Faktor-faktor apasaja yang mendukung dan menghambat keberhasilan, kurang penjelasan narasinya misalnya menggambarkan terkait Nilai SAKIP (penjelasan kurang selaras untuk semua indikator) dipenjelasan bukan Nilai Sakip yang dijelaskan.
- Analisis efisiensi anggaran dibuatkan data tabel saja atau kalau ada penjelasan lain bisa saja ditampilkan/ditambahkan.
- Program atau kegiatan apa saja yang mendukung keberhasilan indikator sasaran
- Pastikan lagi data-datanya, keselarasan antara analisis agar menyambung dengan data yang disajikan di tabel.
- Jelaskan program kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator sasaran dan atau crosscutting dengan SKPD lain.
- Lkj bisa ditambahkan foto-foto kegiatan yang dilaksanakan
- Perbandingan dengan Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional jika ada.



4. Catatan untuk Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- Jelaskan lebih detail lagi perubahan PK dan Anggaran pada Bab II karena masih kurang penjelasannya.
- Tujuan SKPD tentang IKM tidak perlu dijelaskan terlalu panjang lebar.
- Program kegiatan tetap dijelaskan juga walaupun bentuk datanya adalah tabel.
- Analisis terhadap indikator sasaran masih kurang
- Analisa capaian PK tahun 2024 dijelaskan
- Hal 30 faktor pendorong dan penghambat antara nilai sikip dan IKM sama seharusnya berbeda.
- Bapperida bantu untuk cek keselarasan PK dengan Renstra
- Jelaskan program kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator sasaran dan atau croscutting dengan SKPD lain.
- Lkj bisa ditambahkan foto-foto kegiatan yang dilaksanakan
- Perbandingan dengan Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional jika ada.



5. Catatan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

- Hal 21 ditambahkan lagi penjelasan tentang data yang ada di tabel
- Analisis terhadap Meningkatkan fasilitasi pelatihan lebih detail lagi seperti apa pelatihannya.
- Analisis capaian realisasi per sasaran, program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dipertajam lagi
- Lihat kembali Permenpan 53 tahun 2014 apa saja sistematika penyusunan LKj atau isi dari per bab.
- Bapperida bantu cek keselarasan PK dengan Renstra
- Jelaskan program kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator sasaran dan atau croscutting dengan SKPD lain.
- Lkj bisa ditambahkan foto-foto kegiatan yang dilaksanakan
- Perbandingan dengan Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional jika ada.



6. Catatan untuk Inspektorat sebagai berikut:

- Tujuan Renstranya sudah cukup bagus
- Level kapabilitas APIP penghambatnya belum dijawab di upaya ke depannya jadi perlu ditambahkan lagi.

- ZI belum optimal ini bisa dijelaskan lebih detail lagi, belum optimalnya ini seperti apa misalnya menambah waktu pendampingan.
- Dari data tabel tentang pengambilan sampel ZI lebih di detailkan lagi cerita pengambilan sampelnya itu seperti apa.
- Setiap data yang ada tabel juga ditambahkan persentasenya.
- Dijelaskan penambahan dari realisasi 24 ke 64.
- Diperjelas lagi penjelasan untuk SKPD yang menindaklanjuti LHE Inspektorat dari 30 hanya 10 SKPD yang sudah selesai menindaklanjuti LHEnya.
- Dijelaskan lagi kenapa dari TPI 80% itu sudah dibilang cukup baik, menargetkan indikatornya cuma 60%, kegiatan di lapangan cek lagi perhitungan persentase pengambilan targetnya.
- Diceritakan bagaimana mendorong tindaklanjut SKPD terhadap hasil LHE
- Ditabel renaksi terkait RB ditambahkan persentasenya, tabel masih ada renaksi-renaksi yang belum terealisasi, dijelaskan lagi 19 renaksi itu apakah cuma karena belum ada data dukung saja atau ada hal-hal lain.
- Upaya ke depannya bisa ditambahkan tentang pembaharuan Tim Evaluasi setiap tahunnya itu.
- Pada penjelasan program proses pemberian rekomendasinya itu seperti apa? Bagaimana upaya agar rekomendasi ini ditindaklanjuti terkait RB on going dan ex ante.
- Penjelasan kenaikan MCP KPK dan penjelasan penurunan indeksnya
- Efisiensi hal 58, ditambah penjelasan sub bab (efektifitas anggaran) efisiensi sumber daya per indikator dalam satu tabel.
- Dianalisa juga efisiensi anggaran dalam bentuk seperti seperti: kegiatan zoom dll.
- Memastikan kebenaran data sesuai dengan PK terbaru juga data tambahan yang terbaru
- Data brancmark jika ada perbandingan ditampilkan, jika tidak ada tidak usah.



7. Catatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:
 - Bab II seharusnya menyajikan data secara umum saja tidak perlu menganalisa sedangkan Bab III tambahkan analisa tujuannya
 - PK Kadis saja tidak perlu PK Jabatan lainnya yang disajikan
 - Masukan IKUnya pada Bab II dan dilampirkan juga
 - Rencana program masuk lampiran saja
 - Tabel analisis sasaran judul tabel capaian tahun lalu ditulis tahunnya misal 2023
 - Persentase peningkatan pendapatan target 100 realisasi 100 capaian, 100,58 jadi cek lagi kebenaran data ada yang di tabel.
 - Hal 40 target realisasi isinya kategori harusnya di isi angka
 - Analisa hambatan dan upaya yang dilakukan lebih mendalam lagi

- Data yang disajikan masih kurang dan pastikan lagi data-data yang disajikan kebenarannya
- Data efisiensi belum ada
- Analisis rencana aksi untuk perbaikan kedepannya belum ada
- Data tabel boleh saja menyajikan program penunjang lainnya tetapi dijelaskan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis SKPD.
- Data brancmark jika ada perbandingan ditampilkan, serta wilayah-wilayah lainnya sebagai data pembanding misal kab/kota atau provinsi.
- Jelaskan program kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator sasaran dan atau croscutting dengan SKPD lain.
- Lkj bisa ditambahkan foto-foto kegiatan yang dilaksanakan



8. Catatan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- Kalau ada nilai berupa ranking terhadap nilai sistem merit bisa ditambahkan
- Tambahkan penjelasan tentang program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja di bawah tabel realisasi kinerja.
- Cek kembali dokumen PK sesuaikan pohon kinerja baru untuk semua SKPD



9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Hal 16 Deskripsi tahun perjanjian kinerjanya salah ketik tertulis 2023 harusnya 2024.
- Pastikan PK nya sesuai dengan Pohon Kinerja
- Tambahkan tabel di awal bab III
- Penetapan predikat itu berdasarkan apa saja
- Lebih dipertajam lagi analisa hambatan dan upaya-upaya pencapaian kinerja.
- Hambatan dan solusi harus selaras dan lebih dideskripsikan lagi
- Semua penjelasan atau deskripsinya masih kurang terhadap data yang disajikan
- Kualitas analisis terhadap data lebih dipertajam lagi
- Bab II masukkan IKU nya



10. Catatan untuk Kecamatan (Kecamatan Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Batumandi, Awayan, Tebing Tinggi, Juai dan Halong) sebagai berikut:

- Kecamatan Lampihong penjelasan capaian kinerjanya tidak sesuai dengan data yang ada di tabel.
- Upaya apa saja yang dilakukan kecamatan untuk meningkatkan keaktifkan LKD
- Deskripsi Rencana aksi yang mau dilakukan ke depan kurang tepat harusnya yang dilakukan hal baru bukan kegiatan yang memang menjadi rutinitas, seandainya pun sama kegiatannya tapi apa yang baru dari kegiatan tersebut misalnya ada penambahan jumlah kegiatannya dan ditambahkan seperti apa kegiatannya.
- Hasil LHE di Bab 3 paling akhir di kinerja lainnya
- Rencana ke depan analisisnya dimasukkan
- Dijelaskan aspek-aspek penilaian SKM
- Kecamatan Batumandi Penjelasan dengan tabel masih ada yang tidak nyambung
- Analisis penyebab keberhasilan dan penjelasan antara faktor penyebab dengan rencana aksi tidak nyambung.
- Program kegiatan dijelaskan atau diceritakan seperti apa menunjang sasaran kinerja dan bisa dimasukkan foto-foto kegiatan
- Kecamatan Juai Analisis Perhitungan SKM itu lebih dianalisa lagi seperti hal-hal apa yang masih kurang.
- Data tabel yang ada di tabel harus selaras dengan deskripsi atau hasil analisisnya
- Kecamatan Halong dan semua kecamatan agar tujuan dimasukan, target dan realisasi secara umum tidak perlu detail.
- Bab 2 dimasukan tujuannya tidak usah pakai penjelasan detail, pada bab 3 penjelasan yang lebih detail.
- Sasaran 1, IKM tercapai, tapi mengalami tren penurunan perlu dijelaskan/dideskripsikan dengan lebih baik lagi. Juga upaya-upaya apa yang sudah yang dilakukan dalam rangka perbaikan SKM dikupas lebih detil lagi dengan analisis data berdasarkan tabel lebih mendalam.
- Solusinya: perlu pemetaan masalah dalam mencapai target IKM, karena masih manual. Ditahun yang akan datang diupayakan berbasis online/aplikasi.
- Efisiensi: dibagian akhir bab 3 sub bab 3, dikompilasi/gabungan
- Capaian kinerja dibagi capaian anggaran untuk menghitung efisiensi
- Hal-hal seperti pelayanan dapat diceritakan di efisiensi sumberdaya
- Data yang ada di tabel bukan hanya penjelasan angka-angka pada tabel tetapi apa saja yang dilakukan untuk pencapaian kinerja lebih di deskripsikan lagi
- Lebih dijelaskan lagi langkah nyata apa saja yang dilakukan di lapangan karena penjelasan tentang ini masih kurang.

- Analisis kinerja efisiensi setelah analisis anggaran sebelum kinerja lainnya dan tabelnya di satukan
- Hasil LHE di Bab 3 paling akhir di kinerja lainnya



11. Catatan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

- Perhitungan realisasi terhadap target tidak sesuai.
- Target yang tercapai dianalisa dan diseskripsikan lebih detail, berupa kerjasama dengan pihak lainnya yang terkait dst.
- Analisa hambatan yang ada walaupun target telah tercapai.
- Tabel branmack tersendiri beserta penjelasan suberdta darimana, jangan berupa screnshoot.
- Program dan kegiatan penunjang pencapaian kinerja dijelaskan, bagaimana kegiatan tersebut berjalan. Apalagi ada kerjasama-kerjasama dengan pihak lainnya.
- Inovasi-inovasi lebih diperjelas lagi kronologi yang dijalankan oleh SKPD.
- Solusi menjawab hambatan-hambatan yang muncul.
- Sasaran ke 2, masih perlu penjelasan yang lebih rinci dan jelas.
- Menyesuaikan rumusan IKU terhadap hasil capaian sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Masing-masing indikator dimasukan rumus/formulasi, sehingga tidak perlu menampilkan IKU dibab 2.
- Tindak lanjut LHE Inspektorat cukup dilampiran.
- Efisiensi dan perhitungannya masih perlu disesuaikan.
- Refocusing anggaran kegiatan bisa dimasukan juga.
- PK dipastikan kembali selaras dengan Pohon Kinerja.



12. Catatan untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai berikut:

- Program kegiatan menjelaskan atau croscutting dengan SKPD lain lebih dipertajam lagi. Proses pekerjaan di lapangan lebih dijelaskan lagi seperti apa saja
- Analisis efisiensi di akhir dalam bentuk tabel untuk membandingkan kinerjanya
- Analisis data dalam bentuk list lebih dipertajam lagi bukan dalam bentuk list saja
- Bentuk meningkatkan kualitas SDMnya seperti apa, bisa ditambahkan lagi penjelasannya.

- Tabel efisiensi secara keseluruhan
- Program kegiatan yang belum tercapai lebih dipertajam lagi analisis/penjelasannya



13. Catatan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- Perbaiki tabelnya, Hal 21 tabel tujuan dan sasaran yang ada Cuma target per indikator sasaran sementara target tujuan belum ada di tabel.
- Screenshoot PK jangan disajikan di bab III itu taruh di lampiran
- Hal 26 untuk indikator persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu direviu ulang bersama Bapperida
- Upaya-upaya yang dilakukan saat ini masih belum ada atau yang telah dilakukan di tahun 2024
- Permasalahan lebih dideskripsikan lagi analisisnya pada hal 45
- Data dari SKPD lama tahun 2023 bisa ditambahkan sebagai data perbandingan
- Indikator sasaran Angka kelahiran penjelasannya belum ada
- Hal 63 data tabel tidak ada korelasinya dengan analisa di bawah tabel
- Program kegiatan apa saja yang menunjang pencapaian kinerja strategis serta crosscutting dengan SKPD mana saja bisa dijelaskan.
- Hal 85 tambahkan sasarannya
- Deskripsinya pastikan dengan data yang disajikan pada tabel



14. Catatan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

- PK tahun 2025 tidak usah disajikan jadi tahun 2024 saja yang penting sudah sesuai dengan pohon kinerja pada Bab II
- Tujuan dimasukkan pada Bab III (target dan realisasi, capaian) jelaskan secara singkat sebelum pembahasan sasaran strategis
- Lebih dijelaskan riil di lapangannya lagi seperti revitalisasi pasar seperti apa hasil dari revitalisasi ini (dampak dari kegiatan yang dilaksanakan lebih detail lagi diceritakan)
- Solusi sudah menjawab permasalahan
- Hal-hal yang paling berdampak untuk menunjang kenaikan kinerja atau highlight hal-hal penting saja di tahun 2024
- Jangan lupa alasan-alasan keberhasilan mencapai target dideskripsikan yang mencapai 200%.

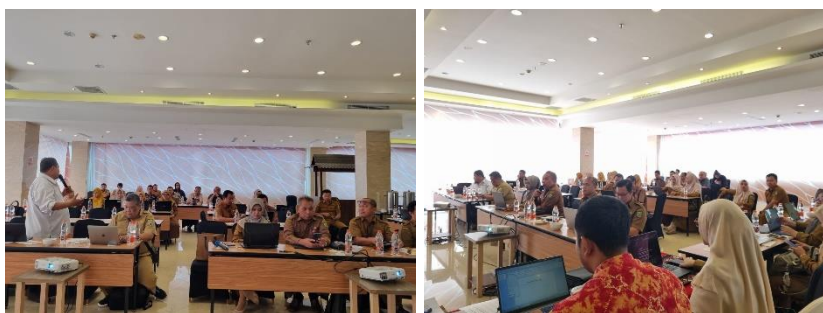
- Program/Kegiatan dipilih salah satu sebagai highlight/difokuskan dan diberi penjelasan.
- Penjelasan pengadaan tanah untuk relokasi pasar penjasannya ditambah/penyerapan anggaran yang rendah.



B. Catatan perbaikan untuk SKPD di Kelas Bapak Novan :

1. Catatan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- PK turunan tidak perlu disajikan, hanya perlu PK JPT
- Sudah terdapat penjelasan atas analisa perbandingan dengan beberapa bagian
- Penjelasan perbandingan selalu ada faktor pendorong dan faktor penyebab menggambarkan apa
- Lebih baik, disajikan perbandingan dalam satu tabel selanjutnya baru dianalisa dan dapat disajikan faktor penyebab, faktor pendorong, program dan kegiatan pendukung dan Solusi
- PK Kabid dan PK JPT belum sinkron, target Kabid lebih rendah dari target JPT
- Efisiensi disajikan pada bagian terakhir dan tambahkan analisisnya
- Jika ada dapat ditambahkan upaya refocusing anggaran untuk mendorong pencapaian indikator sasaran
- Efisiensi anggaran lebih baik menggunakan perhitungan dari KEMENKEU
- Tambahkan data dan capaian ataupun yg berkaitan dengan pencapaian tujuan
- Tambahkan analisis capaian kinerja dilanjutkan dengan analisis program dan kegiatan yang mendukung dan efisiensi



2. Catatan untuk Dinas Kesehatan sebagaiberikut:

- Pada Bab II, Cukup pada PK Eselon II
- Bagian Prioritas nasional tidak perlu disajikan
- Informasi yang disajikan hanya sampai tahun 2024
- Pada Bab III, cukup perbandingan realisasi tahun n dengan n-1 dan n-2
- Perbandingan dengan kab/kota lainnya dipisah dalam subbab khusus
- Bagian faktor penunjang dapat diawali dengan program yang menunjang baru dilanjutkan dengan Analisa
- Belum menggambarkan efisiensi dan efektivitas, yang disajikan adalah identifikasi seperti faktor penunjang. Bagian efisiensi anggaran menyajikan yaitu pergeseran anggaran untuk menunjang capaian kinerja.

- Jika ada dapat ditambahkan upaya refocusing anggaran untuk mendorong pencapaian indikator sasaran



3. Catatan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- Cukup 1 data yang menyajikan faktor pendukung/pendorong
- Realisasi anggaran cukup disajikan pada akuntabilitas keuangan
- PK Perubahan tidak perlu disajikan jika memang tidak ada perubahan
- Capaian kinerja dapat diperbandingkan dengan eselon II maupun eselon III pada provinsi/kab kota lainnya
- Jika ada dapat ditambahkan upaya refocusing anggaran untuk mendorong pencapaian setiap indikator sasaran
- Secara formulasi, perlu diperbaiki indikator IKU untuk perencanaan kedepannya
- Munculkan upaya untuk perbaikan outcome khususnya sasaran 2.2, 4 dan 5 akan dikawal pada level interimediate outcome



4. Catatan untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- Bab II sudah baik
- Bab III, pembahasan disajikan per sasaran untuk mempermudah analisa program kegiatan penunjang dan faktor pendorong atau faktor penyebab kegagalan
- Untuk perbaikan perencanaan kedepan, maka perlu untuk melakukan sinkronisasi pohon kinerja
- Jika ada program dan anggaran yang tidak relevan atau dialihkan, maka dapat disajikan refocusing anggaran dan program untuk pencapaian kinerja



5. Catatan untuk Dinas Sosial sebagai berikut:

- Bab II, Penyajian tabel 2.1 sesuaikan dengan pohon kinerja
- Bab III, Capaian kinerja tahun n dan n-1 salah hitung.
- Tabel populasi PPKS perwilayah dihapus saja agar tidak rancu dengan data jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi tahun 2024.

- Tabel 3.11 Capaian output nya tidak semua 100%, tapi bagaimana bisa diatasnya mencapai 100%, analogi nya ditabel atasnya tidak bisa realisasi 100%
- Analisis program kegiatan jelaskan jadikan satu saja, penjelasannya jangan lompat-lompat.
- Perbaiki lagi data, jangan sampai ada data yg tidak sinkron



6. Catatan untuk Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- Sistematika penyusunan perlu diperbaiki, BAB II, terkait perhitungannya tolong diperbaiki
- BAB III, indikator sasaran, indeks kualitas air samakan aja dengan draft kwn2 yg lain2, sajikan realisasi terhadap RPJMD, Nasional, dan tahun sebelumnya
- Analisis pencapaian tujuannya, cara perhitungannya, faktor pendorong dijelaskan lebih detil dan relevan (hal-hal yang memungkinkan mengintervensi)
- Terkait Efisiensi, Jika ada program dan anggaran yang tidak relevan atau dialihkan, maka dapat disajikan refocusing anggaran dan program untuk pencapaian kinerja



7. Catatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Tambahkan analisa kinerja program dan kegiatan yang menunjang, jika perlu dapat ditambahkan analisa mendalam seperti pembahasan persasaran yang ditunjang oleh program yang mana dan kegiatan yang mana
- Terkait Efisiensi, Jika ada program dan anggaran yang tidak relevan atau dialihkan, maka dapat disajikan refocusing anggaran dan program untuk pencapaian kinerja
- Upaya kedepan yang dilakukan disajikan persasaran dan dapat ditambahkan upaya reviu target kinerja sebagai alternatif Solusi atas target kinerja yang sudah tercapai
- Rencana aksi LHE AKIP tidak wajib disajikan dalam LKIP



8. Catatan untuk Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- Matriks kinerja dan IKU diganti dengan data terbaru
- PK Eselon III dihilangkan saja, cukup PK Eselon II.

- Tambahkan analisa teknis terkait capaian load factor dan ungkapkan sehingga kinerja dapat tercapai seperti program dan kegiatan yang mendukung seperti penambahan armada
- Kinerja eselon III diintervensi sebagai analisa kinerja sasaran dan hubungkan dengan program dan kegiatan yang dijalankan untuk mendukung kinerja
- Analisis program dan kegiatan lebih menjelaskan kinerja program, capaiannya dan kegiatan yang dilakukan
- Terkait Efisiensi, Jika ada program dan anggaran yang tidak relevan atau dialihkan, maka dapat dinarasikan refocusing anggaran dan program yang menjelaskan program yg mana, dialokasikan kemana, besarnya berapa



9. Catatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- PK Eselon III dihilangkan saja, cukup PK Eselon II
- Yang dibandingkan dengan tahun n-2 adalah realisasi bukan capaian agar terlihat peningkatannya



10. Catatan untuk Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

- Bab II, sudah cukup baik
- Program dan kegiatan yang menunjang sasaran pertama kurang selaras
- Yang disajikan dalam LKIP, cukup program dan kegiatan yang menunjang capaian sasaran sedangkan kegiatannya lainnya cukup menjadi keterangan
- Indikator kedua, cukup disebutkan kinerja yang dilakukan untuk mendukung
- Data realisasi program pengelolaan aplikasi informatika tidak selaras dengan data kinerja pada tabel di atasnya
- Terkait Efisiensi, Jika ada program dan anggaran yang tidak relevan atau dialihkan, maka dapat dinarasikan refocusing anggaran dan program yang menjelaskan program yg mana, dialokasikan kemana, besarnya berapa



11. Catatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- Tambahkan IKU dan formulasinya dalam Bab II
- Cukup Penyajian PK Eselon II Pada Bab II
- Untuk kedepannya, lakukan formulasi perhitungan ulang terkait cabor berprestasi dengan penjelasan adalah klasifikasi cabor yang mendapat medali dan revisi ulang penentuan targetnya
- Tambahkan analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja
- Terkait Efisiensi, Jika ada program dan anggaran yang tidak relevan atau dialihkan, maka dapat dinarasikan refocusing anggaran dan program yang menjelaskan program yg mana, dialokasikan kemana, besarnya berapa

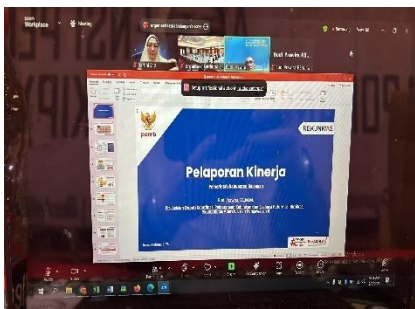


12. Catatan untuk LKIP Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai berikut:

- Jika terdapat indikator sasaran yang tidak selaras dengan RPJMD maka dibuatkan BA Penyesuaian
- Tujuan dapat disajikan sedikit dalam LKIP
- Pada analisa capaian, sajikan 2 (dua) crosscutting yang mendukung indikator sasaran



13. Dokumentasi Kegiatan Asistensi Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:



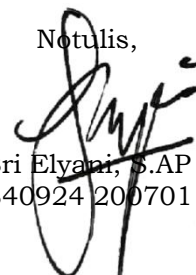
Demikian notulen ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Mengetahui:
Kepala Bagian Organisasi,


Hj. Ernawati, S.STP., M.M
NIP 19800116 199810 2 001

Paringin Selatan, 6 Februari 2025

Notulis,


Sri Elyani, S.AP
NIP 19840924 200701 2 005